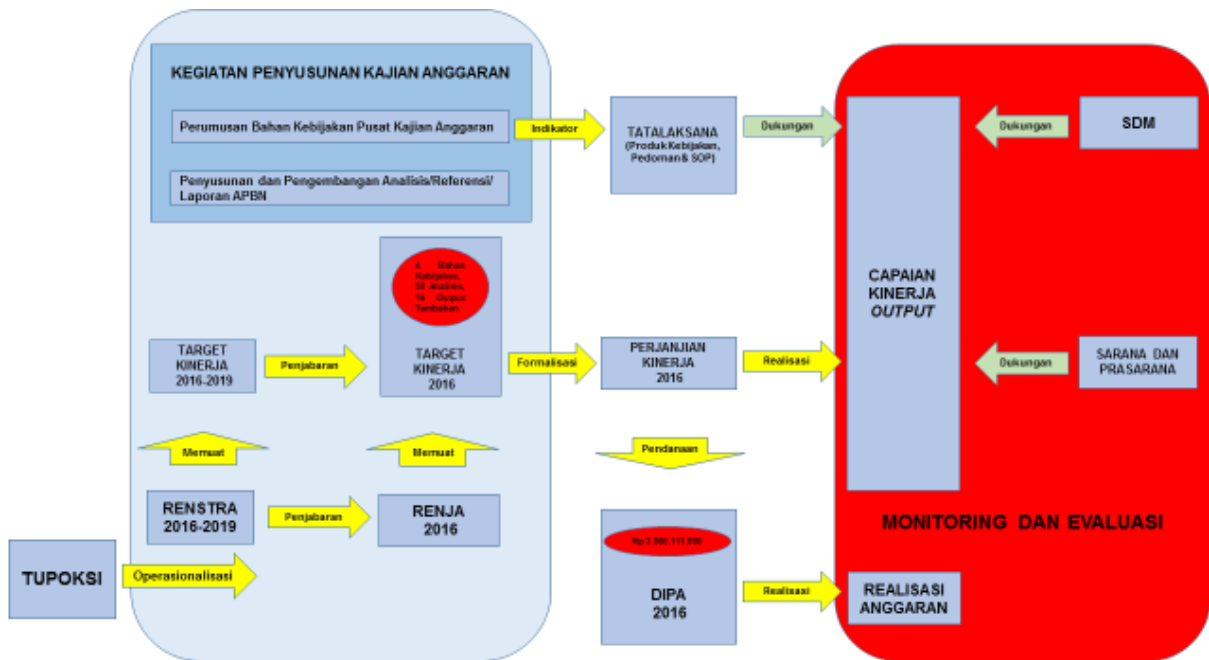


PENDAHULUAN

Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan pencapaian atas perbandingan antara perencanaan dengan realisasi. Perencanaan yang dimaksudkan adalah perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) Pusat Kajian Anggaran 2016-2019. Kemudian berdasarkan renstra tersebut dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) 2016. Dalam Renstra termuat indikator keberhasilan sekaligus targetnya selama periode 2016-2019. Selanjutnya target kinerja *output* tersebut dijabarkan setiap tahunnya melalui target kinerja *output* dalam Renja 2016. Target kinerja *output* yang termuat dalam Renstra dan Renja merupakan target kinerja organisasi Pusat Kajian anggaran, yang kemudian diformalisasikan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dituangkan dalam Penilaian Perjanjian Kerja Pegawai (PPKP).



Gambar 1. Skema Penyusunan Laporan Tahunan Pusat Kajian Anggaran

Untuk tahun 2016 target kinerja Pusat Kajian Anggaran adalah 4 Bahan Kebijakan dan 50 Analisis (*cascading*) sesuai yang termuat dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Keahlian dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran. Disamping itu juga terdapat target kinerja tambahan (*noncascading*) sebanyak 16 *Output* Tambahan.

Untuk mendukung pencapaian target kinerja maka dibutuhkan pendanaan sebesar Rp 3.980.111.000 yang dituangkan dalam DIPA Pusat Kajian Anggaran Tahun 2016.

Disamping pendanaan, pencapaian target kinerja juga didukung dengan keberadaan SDM, serta kecukupan sarana dan prasarana. Hal yang tak kalah penting pencapaian target kinerja juga didukung dengan ketatalaksanaan, baik yang berisi produk kebijakan seperti dokumen perencanaan juga didukung dengan penyusunan berbagai pedoman dan SOP. Hal ini juga yang menjadikan kegiatan penyusunan kajian anggaran terdiri dari dua sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran, dan Sub Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/ Laporan APBN. Dalam hal ini produk kebijakan seperti dokumen perencanaan dan berbagai pedoman dan SOP merupakan produk dari Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari Sub Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/ Laporan APBN.

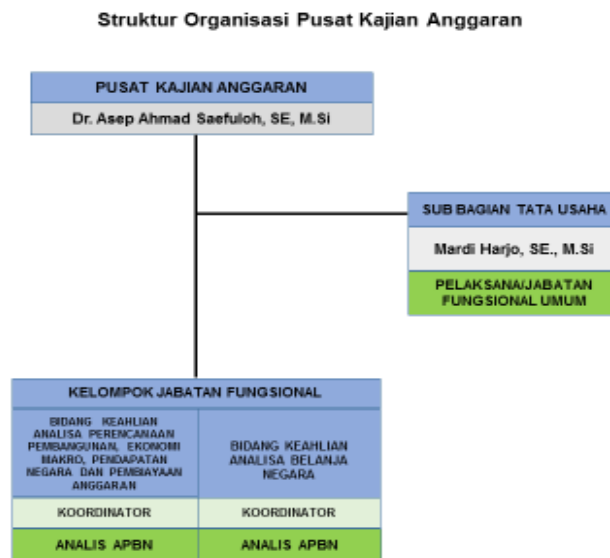
Terakhir agar perencanaan, baik *output*, kegiatan dan anggaran serta pengelolaan sumber daya lainnya berjalan dengan baik maka didukung dengan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulannya.

BAB I PERENCANAAN

A. Renstra Pusat Kajian Anggaran

Pusat Kajian Anggaran secara resmi terbentuk setelah disahkannya Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Sesuai dengan Peraturan Sekjen tersebut, tugas Pusat Kajian Anggaran adalah mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN. Adapun fungsinya adalah:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian anggaran;
- f. Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;
- g. Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;
- h. Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran; dan,
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan kelembagaan Pusat Kajian Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang

akuntabel, Pusat Kajian Anggaran dituntut memiliki visi dan misi yang terangkum dalam suatu dokumen perencanaan. Untuk itu, Pusat Kajian Anggaran menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pusat Kajian Anggaran 2016-2019. Renstra yang disusun oleh Pusat Kajian Anggaran merupakan pertama kali dikarenakan Pusat Kajian Anggaran baru terbentuk pada 1 Oktober 2015.

Hal utama yang ingin dicapai dalam Renstra Pusat Kajian Anggaran 2016-2019 dalam konteks perencanaan adalah bagaimana Pusat Kajian Anggaran merencanakan program dukungan keahlian bidang anggaran kepada DPR RI guna memperkuat kelembagaan Badan Keahlian DPR RI sebagai organisasi pemberi dukungan keahlian melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya serta menjadikan Badan Keahlian DPR RI sebagai organisasi yang profesional, andal, dan akuntabel.

Dalam Renstra Pusat Kajian Anggaran disusun visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program/kegiatan serta *outcome/output*. Karena Pusat Kajian Anggaran adalah unit organisasi Eselon II, yang mendukung pelaksanaan Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan Badan Keahlian DPR RI maka disusun Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran. Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran terbagi dalam dua sub kegiatan yaitu:

- a. Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran; dan,
- b. Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN.

Indikator kinerja Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran untuk kurun waktu 2016-2019 ditetapkan pada tabel.1.1

Tabel 1.1 Indikator Kinerja dan Target Kegiatan

Tahun	Target	
	Jumlah Target Bahan Kebijakan	Jumlah Target Analisis/Referensi/ Laporan APBN
2016	4	50
2017	3	50
2018	3	50
2019	3	50

Untuk melaksanakan Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran, selama kurun waktu 2016-2019 Pusat Kajian Anggaran memperkirakan kebutuhan anggaran sebesar Rp 21.796.289.150. Kemudian bagaimana penjabaran dari visi sampai *outcome/output* yang tertuang dalam Renstra Pusat Kajian Anggaran 2016-2019 disajikan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2. Rencana Strategis Pusat Kajian Anggaran Tahun 2016-2019

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan dan Strategi		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Komponen Kegiatan	Outcome/Output	Indikator
Menjadi Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, dan akuntabel				Memberikan dukungan keahlian pada pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan	11	Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan		Terwujudnya dukungan keahlian di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI	Persentase tersedianya kajian/analisis/referensi/laporan di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan serta isu-isu terkait kedewanan
	Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.	Tercapainya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.	Penyediaan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada DPR RI yang tepat waktu	Peningkatan kualitas dan kuantitas analisis APBN yang didukung dengan penyediaan jabatan fungsional analis APBN yang cukup. Selain itu, harus diimbangi dengan pengembangan kompetensi dan kapasitas keahlian analis anggaran yang mumpuni	5798	Penyusunan Kajian Anggaran		Analisis/referensi/ laporan APBN	Jumlah Analisis/referensi/laporan APBN
Menjadi Pusat Kajian Anggaran sebagai organisasi pendukung DPR RI bidang keahlian anggaran yang profesional, andal dan akuntabel				Peningkatan kualitas produk analisis dan karya tulis ilmiah serta materi diklat APBN melalui penyediaan dan pengembangan kompetensi Analis APBN yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang didukung dengan penyusunan instrumen pembinaan jabatan fungsional Analis APBN.	5798	Penyusunan Kajian Anggaran		Analisis/referensi/ laporan APBN	Jumlah Analisis/referensi/laporan APBN
		a. Terwujudnya tatakelola dukungan kajian anggaran yang baik.	1) Pengelolaan dukungan kajian anggaran yang baik.	Perumusan bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran.	051	Perumusan bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran	Perumusan bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran	Bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran	Jumlah bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran
	1. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.	b. Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang membentuk arah politik anggaran Dewan.	2) Penyediaan produk Kajian APBN yang tepat waktu.	Penyusunan Analisis, Referensi dan Analisis Ringkas Cepat APBN.	052	Penyusunan dan Pengembangan analisis/referensi/laporan APBN	Penyusunan analisis/referensi/ laporan APBN	Analisis/referensi/ laporan APBN	Jumlah Analisis/ referensi/ laporan APBN
					A		Penyusunan analisis/referensi/ laporan APBN	Analisis/referensi/ laporan APBN	Jumlah Analisis/ referensi/ laporan APBN
					1		Penyusunan Analisis APBN	Analisis APBN	Jumlah Analisis APBN
					2		Penyusunan Referensi	Referensi	Jumlah Referensi
	2. Memperkuat manajemen pengetahuan.	c. Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan.	3) Penyediaan produk karya tulis ilmiah dan pengetahuan APBN.	Penerbitan karya tulis ilmiah dan pengetahuan APBN.	B		Penerbitan Buletin APBN/ARC	ARC	Jumlah ARC
					1		Penerbitan Jurnal/buku	Jurnal/Buku	Jumlah Buku
					2		Penerbitan Jurnal	Jurnal	Jumlah Jurnal
					2		Penerbitan Buku	Buku	Jumlah Buku
	3. Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN	d. Terwujudnya pengembangan Analis APBN yang profesional.	4) Peletakan dasar-dasar profesionalitas jabatan Analis APBN.	Pengembangan profesi Analis APBN.	C		Penyelenggaraan Database	Data dan Informasi	Jumlah Laporan
					1		Kegiatan Pengumpulan Data	Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi
					D		Pengembangan profesi Analis APBN.	Bahan Pengembangan	Jumlah Bahan Pengembangan
				1		Pengembangan Kompetensi	Penyelenggaraan Workshop	Jumlah Laporan	
				2		Pengembangan Instrumen profesi Analis APBN.	Bahan Pengembangan Instrumen profesi Analis APBN.	Jumlah Bahan Pengembangan Instrumen profesi Analis APBN.	

B. Rencana Kerja Tahun 2016

Tahun 2016 merupakan tahun pertama bagi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai organisasi baru tentu tahun pertama tersebut menjadi tantangan bagi Pusat Kajian Anggaran karena di satu sisi harus menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan keahlian kepada DPR RI secara optimal tetapi di sisi lain harus terus menata kelembagaannya agar dapat mencapai visinya, “Menjadi Pusat Kajian Anggaran sebagai organisasi pendukung DPR RI bidang keahlian anggaran yang profesional, andal, dan akuntabel.”

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, sebagai bagian dari proses pencapaian akuntabilitas kinerja maka Pusat Kajian Anggaran menyusun rencana kerja (renja) sebagai panduan arah kebijakan, strategi, dan target yang akan dicapai tahun 2016 serta kebutuhan penganggarnya.

Renja disusun sebagai bagian dari proses kesinambungan perencanaan strategis Pusat Kajian Anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pusat Kajian Anggaran 2016-2019. Selanjutnya dalam Renja dijelaskan Arah Kebijakan dan Strategi, Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja serta kebutuhan anggaran.

Tema yang diangkat dalam Renja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2016 adalah konsolidasi Produk Analisis APBN. Dukungan kajian anggaran yang dilakukan harus menghasilkan kajian-kajian APBN yang mampu memberikan rekomendasi bagi DPR RI dalam memperbaiki tatakelola APBN khususnya alokasi dan distribusi. Selanjutnya DPR RI dapat memanfaatkan hasil-hasil analisis APBN tersebut dalam menjalankan fungsi anggarannya.

Output dari Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran untuk tahun 2016 adalah analisis/referensi/laporan APBN. Adapun indikator kinerja diukur melalui:

1. Jumlah bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran; dan,
2. Jumlah analisis/referensi/laporan APBN.

Tabel 1.3. Target Kinerja Tahun 2016

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Indikator	Target (Dokumen)
051	Perumusan bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran	Bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran	Jumlah bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran	4
052	Penyusunan analisis/referensi/laporan APBN	Analisis/referensi/laporan APBN	Jumlah Analisis/referensi/laporan APBN	66
A	Penyusunan analisis/referensi/laporan APBN	Analisis/referensi/laporan APBN	Jumlah Analisis/referensi/laporan APBN	43
1	Penyusunan Analisis APBN	Analisis APBN	Jumlah Analisis APBN	14
2	Penyusunan Referensi	Referensi	Jumlah Referensi	5
3	Penerbitan Buletin APBN/ARC	ARC	Jumlah ARC	24

B	Penerbitan Jurnal/buku	Jurnal/Buku	Jumlah Buku	7
1	Penerbitan Jurnal	Jurnal	Jumlah Jurnal	2
2	Penerbitan Buku	Buku	Jumlah Buku	5
C	Penyelenggaraan Database	Data dan Informasi	Jumlah Laporan	6
1	Kegiatan Pengumpulan Data	Data dan Informasi	Jumlah Laporan	6
D	Pengembangan profesi Analis APBN.	Bahan Pengembangan	Jumlah Laporan dan Bahan Pengembangan	10
1	Pengembangan Kompetensi	Penyelenggaraan Workshop	Jumlah Laporan	3
2		Studi Banding	Jumlah Laporan	2
3	Pengembangan Instrumen profesi Analis APBN.	Bahan Pengembangan Instrumen profesi Analis APBN.	Jumlah Bahan Pengembangan Instrumen profesi Analis APBN.	5

Adapun target dari masing-masing indikator tersebut adalah:

1. Target kinerja utama (*cascading*) dari Bahan Kebijakan ditetapkan sebanyak 4 laporan, yaitu Renstra dan Renja, Pedoman dan SOP, LAKIP dan Laporan Tahunan.
2. Target kinerja utama (*cascading*) dari Target Analisis/Referensi/Laporan APBN adalah sebanyak 50 produk yang terdiri dari analisis APBN, referensi, bulletin APBN, jurnal dan buku APBN, sementara untuk target kinerja tambahan (*noncascading*) ditetapkan 16 *output* yang terdiri dari penyelenggaraan *database*, hasil studibanding, pengembangan kompetensi dan pengembangan profesi Analis APBN.

Untuk memudahkan pencapaian target maka untuk tahun 2016 disusun perencanaan *output* per bulannya. Adapun penjelasan target pencapaian *ouput* Pusat Kajian Anggaran disajikan dalam tabel 1.4.

Tabel 1.4. Perencanaan Output Pusat Kajian Anggaran Tahun Anggaran 2016

No	Jenis Output	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
1	RENSTRA	1												1
2	RENJA		1											1
3	LAKIP												1	1
4	LAPORAN TAHUNAN												1	1
	TOTAL DOKUMEN KEPALA PUSAT	1	1										2	4
5	ANALISIS DISESUAIKAN SIKLUS			APBNP 2 analisis	Perencanaan (RKP) 2 analisis	ADEM & PPKF 2 analisis		Lapsem & LKPP 4 analisis		APBN INDUK 2 analisis		Lintas Bidang 2 analisis		14
6	BULETIN APBN/ARC	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	24
7	REFERENSI									5				5
8	JURNAL						1					1		2
9	BUKU TERKAIT APBN					1		1			1		2	5
	TOTAL DOKUMEN ANALIS	1	3	4	4	5	4	7	2	9	3	5	4	50
	TOTAL DOKUMEN PUSAT	2	4	4	4	5	4	7	2	9	3	5	6	54
10	PENGUMPULAN DATA KE DAERAH		2		2						2			6
11	PENGEMBANGAN INSTRUMEN PROFESI			1		1		1		1			1	5
12	WORKSHOP			1	1								1	3
13	PENGEMBANGAN KOMPETENSI LN			1				1						2
	TOTAL OUTPUT TAMBAHAN		2	3	1	1		1		1	2		2	16

BAB II PENCAPAIAN TARGET KINERJA

A. Pencapaian Kinerja Organisasi

Pencapaian target kinerja organisasi Pusat Kajian Anggaran mencapai 101,87 persen untuk kinerja *cascading* dan 108,25 persen untuk *noncascading*. Perincian dari masing-masing pencapaian target tersebut dijelaskan berikut.

1. Pencapaian Output Perumusan Kebijakan

Pada tahun 2016 ditetapkan *output* perumusan kebijakan sebanyak 4 *output*. Dalam pelaksanaannya telah dihasilkan 4 *output* bahan kebijakan Pusat Kajian. Dengan demikian pencapaian adalah 100 persen. Adapun *output* yang dimaksudkan adalah:

- 1) Renstra Pusat Kajian Anggaran 2016-2019;
- 2) Rencana Kerja 2016 dan 2017;
- 3) Paket Pedoman dan SOP; dan,
- 4) LAKIP Tahun 2015 dan Laporan Tahunan.

Secara khusus Pedoman dan SOP yang sudah dihasilkan selama tahun 2016 adalah 6 Pedoman dan 19 SOP (lihat tabel 2.1). Pedoman dibutuhkan untuk mendukung pencapaian *output* analisis seperti Analisis APBN, Referensi APBN, ARC, Buletin, Jurnal dan Buku. Pedoman ini disusun agar Analisis APBN, Referensi APBN, ARC, Buletin, Jurnal dan Buku memiliki standarisasi yang sama meskipun dikerjakan oleh Analisis APBN yang berbeda-beda.

Tabel 2.1. Pedoman dan SOP

No.	Nama Pedoman	No.	Nama Pedoman
1	Pedoman Penulisan Analisis APBN.	1	SOP Kunjungan Kerja ke LN.
2	Pedoman Penulisan Referensi APBN.	2	SOP Layanan Permintaan Anggota atau AKD.
3	Pedoman Penulisan ARC.	3	SOP Pemanggilan Pakar atau Narasumber.
4	Pedoman Penulisan Buletin.	4	SOP Pendampingan ke AKD.
5	Pedoman Penulisan Jurnal.	5	SOP Pendokumentasian hasil kerja.
6	Pedoman Penulisan Buku.	6	SOP Penerbitan Jurnal.
		7	SOP Pengumpulan data dalam kota/pembelian data.
		8	SOP pengumpulan data ke daerah.
		9	SOP Penulisan Buku.
		10	SOP Penyelenggaraan <i>Workshop</i> .
		11	SOP Penyusunan Analisis APBN.
		12	SOP Penyusunan ARC.
		13	SOP Penyusunan Referensi APBN.
		14	SOP Penyusunan Buletin.
		15	SOP Penyelenggaraan Rapat Internal.

		16	SOP Penyelenggaraan Rapat di Lingkungan PKA.
		17	SOP Penyusunan Rencana Kerja.
		18	SOP Penyusunan LAKIP.
		19	SOP Penyusunan Laporan Tahunan.

Adapun SOP dibutuhkan untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam rangka pencapaian *output* analisis. Misalnya untuk menghasilkan produk Analisis APBN dibutuhkan SOP Penyusunan Analisis APBN. Begitu juga untuk menghasilkan buletin APBN yang terbit setiap dua minggu sekali maka kegiatan untuk menghasilkan buletin tersebut diatur melalui SOP Penyusunan Buletin. Pada pencapaian output perumusan kebijakan juga didukung dengan 5 laporan kegiatan keikutsertaan workshop.

2. Pencapaian *Output* Analisis

Pada tahun 2016 ditetapkan *output* utama Analisis (*cascading*) sebanyak 50 *output*. Dalam pelaksanaannya telah dihasilkan 52 *output* Kajian sehingga pencapaian adalah 103,74 persen. Adapun *output* Penyusunan analisis/referensi/laporan APBN terdiri dari:

1. Jumlah analisis sebanyak 14 buah atau tercapai 100 persen yang terdiri dari:
 - 1) Analisis RKP dan Pembicaraan Pendahuluan APBN: Optimalisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017;
 - 2) Analisis RKP dan Pembicaraan Pendahuluan APBN: Pembangunan Infrastruktur Berdimensi Kewilayahan untuk Atasi Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah;
 - 3) Analisis RKP dan Pembicaraan Pendahuluan APBN: Kinerja dan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Non Migas;
 - 4) Analisis RKP dan Pembicaraan Pendahuluan APBN: Kemiskinan dan Disparitas Pendapatan: Masalah dan Tantangannya;
 - 5) Analisis Laporan Semester APBN Tahun Anggaran 2016: Kinerja Penyerapan APBN Tahun Anggaran 2016;
 - 6) Analisis Laporan Semester APBN Tahun Anggaran 2016: Anggaran Belanja Modal Infrastruktur, Jika Serapan Terlambat Infrastruktur Terlambat;
 - 7) Analisis RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015: Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015;
 - 8) Analisis RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015: Tinjauan Singkat Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015;
 - 9) Analisis RUU Tentang APBN: Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Infrastruktur;
 - 10) Analisis RUU Tentang APBN: Menuju *Holding* BUMN yang Ideal;
 - 11) Analisis RUU Tentang APBN: Penyerapan Anggaran dalam APBN; dan,

- 12) Analisis RUU Tentang APBN: Critical Notes Atas Capaian Pertumbuhan, Kemiskinan, Pengangguran, Ketimpangan dan Pengendalian Inflasi.
 - 13) Analisis RUU APBN Perubahan: Target Penerimaan Migas Harus Realistis;
 - 14) Analisis RUU APBN Perubahan: Kebijakan dan Pengalihan Pengelolaan Subsidi Energi yang Tepat Sasaran;
2. Jumlah Referensi sebanyak 5 buah atau mencapai 100 persen yang terdiri dari:
 - 1) Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dalam Usaha Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dari Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Indikator dan Sarana Kesehatan;
 - 3) Anggaran Kesehatan di BKKBN dan Badan POM;
 - 4) Pembiayaan Infrastruktur; dan,
 - 5) Anggaran Kesehatan di Kementerian Kesehatan.
 3. Jumlah Buletin sebanyak 24 Edisi atau mencapai 100 persen yang terdiri dari:
 - 1) Edisi 1, Vol I, Januari 2016 yang memuat topik tentang, “Mencari Bentuk dan Format Ideal UP2DP” dan “Program Kepedulian Parlemen terhadap Konstituen”;
 - 2) Edisi 2, Vol I, Februari 2016 yang memuat topik tentang, “*Tax Amnesty*: Salah Satu Solusi Capai Target” dan “Otonomi Pengelolaan Keuangan di Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif”;
 - 3) Edisi 3, Vol I, Februari 2016 yang memuat topik tentang, “Kemerosotan Harga Minyak Dunia dan Pengaruhnya bagi Perekonomian Indonesia; dan “Kompleknya Isu Pangan Indonesia”;
 - 4) Edisi 4, Vol I, Februari 2016 yang memuat topik tentang, “Potensi dan Kendala Pengembangan EBT” dan “Urgensi RAPBN-P 2016”;
 - 5) Edisi 5, Vol I, Maret 2016 yang memuat topik tentang “Kesenjangan *Human Capital* Antar Wilayah, Agenda yang Belum Selesai” dan “Pembangunan Berdimensi Wilayah Melalui APBN”;
 - 6) Edisi 6, Vol I, Maret 2016 yang memuat topik tentang, “Berpacu Mengejar Target Penerimaan Pajak Tahun 2016” dan “Mengelola “*Hot Money*” dengan *Tobin Tax*”;
 - 7) Edisi 7, Vol I, April 2016 yang memuat topik tentang, “Potensi Gelembung (*Bubble*) Properti di Indonesia” dan “Utang Indonesia Menuju Ambang Batas”;
 - 8) Edisi 8, Vol I, April 2016 yang memuat topik tentang, “*Cost and Benefit* RUU *Tax Amnesty*” dan “Menyaring BUMN untuk Alokasi PMN yang Tepat”.

- 9) Edisi 9, Vol I, Mei 2016 yang memuat topik tentang, “Peningkatan PPh Melalui Data Pengeluaran Kartu Kredit” dan “Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas”;
- 10) Edisi 10, Vol I, Mei 2016 yang memuat topik tentang, “Pentingnya Membangun Cadangan Strategis Minyak untuk Ketahanan Energi Indonesia” dan “Mendukung Ketahanan Pangan Melalui Asuransi Pertanian”;
- 11) Edisi 11, Vol I, Juni 2016 yang memuat topik tentang, “Kemandirian dan Otonomi Penganggaran DPR RI” dan “Revitalisasi Industri Gula”;
- 12) Edisi 12, Vol I, Juni 2016 yang memuat topik tentang, “Daging Sapi: Selamanya Impor atau Swasembada” dan “Problematika Menerangi Papua dengan Program Indonesia Terang”;
- 13) Edisi 13, Vol I, Juli 2016 yang memuat topik tentang, “Mendorong Sektor Pariwisata Melalui Penguatan Pemasaran Pariwisata” dan “Lima Persen Anggaran Kesehatan dan Pencapaian SDGs Bidang Kesehatan”;
- 14) Edisi 14, Vol I, Juli 2016 yang memuat topik tentang, “Penguatan Daya Saing UMKM Melalui Peningkatan Peran *E-Commerce*” dan “Hadapi MEA, Pemetaan Komoditas atau Produk Unggulan Sebuah Keharusan”;
- 15) Edisi 15, Vol I, Agustus 2016 yang memuat topik tentang, “Meningkatkan Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Pembangunan Kemaritiman” dan “Kendala Indonesia dalam Transisi Menuju UHC”;
- 16) Edisi 16, Vol I, Agustus 2016 yang memuat topik tentang, “Peralihan Kewenangan Pendidikan Menengah ke Pemerintah Provinsi” dan “Menimang-nimang Rencana Kebijakan Kenaikan Cukai Rokok”;
- 17) Edisi 17, Vol I, September 2016 yang memuat topik tentang, “*7-Day Reserve Repo Rate*, Acuan Suku Bunga Baru Bank Indonesia” dan “Mengentaskan Kemiskinan dengan Meningkatkan Ekonomi Desa”;
- 18) Edisi 18, Vol I, September 2016 yang memuat topik tentang, “Indikasi Besarnya Ketergantungan Belanja Daerah terhadap Dana Perimbangan” dan “Petani Garam vs Impor Garam”;
- 19) Edisi 19, Vol I, Oktober 2016 yang memuat topik tentang, “Menggali Potensi Penerimaan Negara di Luar Sektor Primer” dan “Dinamika APBN 2016”;
- 20) Edisi 20, Vol I, Oktober 2016 yang memuat topik tentang, “Penganggaran Partisipatif dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat” dan “Utang Luar Negeri dan Dampaknya terhadap Perekonomian”;
- 21) Edisi 21, Vol I, November 2016 yang memuat topik tentang, “Mengejar Kewajiban Pajak” dan “Kebijakan Pengendalian Utang (Studi Kasus Jerman dan Irlandia)”;

- 22) Edisi 22, Vol I, November 2016 yang memuat topik tentang, “Menuju Subsidi Listrik yang Lebih Tepat Sasaran” dan “Pengelolaan Subsidi LPG 3 Kg Melalui Sistem Kartu Agar Tepat Sasaran”;
- 23) Edisi 23, Vol I, Desember 2016 yang memuat topik tentang, “Permasalahan Sektor Perikanan Tangkap dan Kesejahteraan Nelayan” dan “Komoditas Penentu Kinerja Ekspor Perikanan Indonesia”; dan,
- 24) Edisi 24, Vol I, Desember 2016 yang memuat topik tentang, “Bencana Alam: Kebutuhan Pengangguran dan Antisipasinya; BPJS Kesehatan: Implementasi *Social Security System* yang Terburu-buru”.

Output berikutnya adalah penerbitan jurnal dan buku yang terdiri dari

1. Jurnal Budget sebanyak 2 edisi atau mencapai 100 persen yang terdiri dari:
 - 1) Volume 1, Nomor 1, September 2016 yang memuat 6 topik yaitu:
 - (1) Pengaruh Daya Saing Regional Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia: Analisis Data Panel;
 - (2) Analisis Hubungan Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi, Neraca Perdagangan dan Nilai Tukar Rupiah;
 - (3) Analisis Pengaruh Belanja Negara terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi;
 - (4) Profil Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Wilayah Kota Palangka Raya di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - (5) Depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS dan Pengaruhnya terhadap Ekspor dan Impor; dan,
 - (6) *Trade-Off* Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran.
 - 2) Volume 1, Nomor 2, Desember 2016 yang memuat 5 topik (satu topik tidak tercapai dikarenakan untuk menjaga kualitas tulisan), yaitu:
 - (1) Penerapan Pengangguran Partisipatif Di Tingkat Desa;
 - (2) Pengaruh Belanja Kesehatan Terhadap Angka Harapan Hidup di Kabupaten/Kota Pemekaran Periode 1999-2008: Analisis Data Panel;
 - (3) Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi: Terhadap Kemiskinan di Indonesia;
 - (4) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Sumatera Utara; dan,
 - (5) Analisis *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Indonesia.
2. Buku yang telah disusun terdiri dari 7 buku atau mencapai 100 persen yang terdiri dari:
 - 1) Prediksi Buku Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2017;
 - 2) Anggaran Kesehatan dalam APBN;

- 3) Bunga Rampai Pembangunan Ekonomi;
- 4) Bunga Rampai Isu-Isu Strategis APBN;
- 5) Alternatif Kebijakan Untuk Merealisasikan Aspirasi Pembangunan Daerah Pemilihan Dalam Mekanisme Penganggaran;
- 6) Otonomi Parlemen Menuju Kemandirian Anggaran DPR RI; dan,
- 7) Analisis Sistem Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah.

Sementara untuk target kinerja tambahan (*noncascading*) ditetapkan 16 *output* yang terdiri dari penyelenggaraan *database*, pengembangan kompetensi dan pengembangan profesi Analis APBN. Penyelenggaraan *database* berupa pengumpulan data lapangan yang terdiri dari 8 laporan atau mencapai 133 persen yang terdiri dari berikut:

1. Laporan Pengumpulan Data Ke Jawa Tengah (Kebumen);
2. Laporan Pengumpulan Data Ke Nusa Tenggara Barat;
3. Laporan Pengumpulan Data Ke Sulawesi Tenggara;
4. Laporan Pengumpulan Data Ke Sumate Barat;
5. Laporan Pengumpulan Data Ke Maluku;
6. Laporan Pengumpulan Data Ke Sulawesi Utara;
7. Laporan Pengumpulan Data Ke Jawa Barat (Bandung);
8. Laporan Pengumpulan Data Ke Jawa Barat (Cirebon);

Dalam kategori analisis juga dihasilkan Analisa Ringkas Cepat (ARC) yaitu analisis yang sifatnya pendek dan membutuhkan penyelesaian dalam waktu yang singkat. Produk ini didasarkan pada permintaan sehingga temanya juga disesuaikan dengan permintaan. Selama tahun 2016 jumlah ARC yang dihasilkan adalah:

1. Ringkasan Realisasi APBN-P 2015; dan,
2. Peran Bulog dalam APBN.

Pengembangan kompetensi berupa penyelenggaraan 3 kali workshop atau mencapai 100 persen yang terdiri dari yaitu:

1. Laporan *Workshop* tentang “Menggali Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak”;
2. Laporan *Workshop* tentang “Menuju Otonomi Anggaran: Dinamika dan Kebutuhan Kemandirian Pengelolaan Keuangan Negara”; dan,
3. Laporan *Workshop* tentang “Mencari Peta Jalan Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Untuk Mengatasi Ketimpangan Antar Wilayah”.

Adapun hasil dari studi banding dilakukan dengan penyusunan dua laporan atau mencapai 100 persen yaitu:

1. Laporan Kunjungan ke Inggris; dan,
2. Laporan Kunjungan ke Jerman.

Sementara untuk Pengembangan Instrumen profesi Analis APBN telah disusun sebanyak 5 rancangan peraturan Sekjen DPR RI atau mencapai 100 persen, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Sistematika Standar Kompetensi Kerja dan Diklat Analis APBN;
2. Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Rincian Tugas Pokok, Hasil Kerja dan Standar Kualitas Jabatan Analis APBN;
3. Rancangan Peraturan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pedoman Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis APBN;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pedoman Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Jabatan Fungsional Analis APBN; dan,
5. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pedoman Dan Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis APBN.

3. Distribusi Output

Output yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran didistribusikan kepada Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi-Komisi Terkait, Anggota BURT, Anggota DPR RI, Pejabat di lingkungan BKD dan Setjen DPR RI, dan Analis APBN. Adapun perinciannya dijelaskan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2. Pendistribusian Output Pusat Kajian Anggaran

No	Judul	Ditujukan	Jumlah
1	Buku Renstra Tahun 2016-2019.	Kepala Badan Keahlian Dewan, Kapus PUU, Kabag Perencanaan, dan Kabag Ortala.	10
2	Buku Renja Tahun 2017.	Kepala Badan Keahlian Dewan, Kapus PUU, Kabag Perencanaan, dan Kabag Ortala.	10
3	Buku Pedoman Penulisan Pusat Kajian Anggaran.	Kepala Badan Keahlian Dewan, Kapus PUU, Kabag Perencanaan, dan Kabag Ortala.	10
4	Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Kajian Anggaran.	Kepala Badan Keahlian Dewan, Kapus PUU, Kabag Perencanaan, dan Kabag Ortala.	10
5	Buku Asumsi Dasar Ekonomi Makro.	Pimpinan DPR, Anggota DPR RI, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	300
6	Buku Anggaran Kesehatan Dalam APBN.	Pimpinan DPR, Anggota DPR RI, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	600
7	Buku Bunga Rampai Pembangunan Ekonomi.	Pimpinan DPR, Anggota DPR RI, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	600
8	Buku Bunga Rampai Isu-Isu Strategis APBN.	Pimpinan DPR, Anggota DPR RI, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	600
9	Buku Alternatif Kebijakan Untuk Merealisasikan Aspirasi Pembangunan Daerah Pemilihan Dalam Mekanisme Penganggaran.	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	300
10	Buku Otonomi Parlemen Menuju	Pimpinan DPR, Komisi Komisi	300

	Kemandirian.	Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	
11	Buku Sistem Perencanaan Pembangunan.	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	300
12	Jurnal Isu-isu dan Masalah Keuangan Negara.	Pimpinan DPR, Anggota DPR RI, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	600
13	Jurnal Pengaruh Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	Pimpinan DPR, Anggota DPR RI, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	600
14	Analisis RUU tentang APBN Menuju <i> Holding </i> BUMN yang Ideal.	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	450
15	Analisis RKP dan Pembicaraan Pendahuluan APBN: Optimalisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017.	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	450
16	Analisis RKP dan Pembicaraan Pendahuluan APBN: Pembangunan Infrastruktur Berdimensi Kewilayahan Untuk Atasi Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah.	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	450
17	Analisis RKP dan Pembicaraan Pendahuluan APBN: Kinerja dan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Non Migas.	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	450
18	Analisis RKP dan Pembicaraan Pendahuluan APBN: Kemiskinan dan Disparitas Pendapatan: Masalah dan Tantangannya.	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	450
19	Analisis RUU APBN Perubahan 2016: Target Penerimaan Migas Harus Realistis.	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	450
20	Analisis RUU APBN Perubahan 2016: Kebijakan dan Pengalihan Pengelolaan Subsidi Energi yang Tepat Sasaran.	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	450
21	Analisis Laporan Semester APBN TA 2016: Kinerja Penyerapan APBN TA 2016.	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	450
22	Analisis Laporan Semester APBN TA 2016: Anggaran Belanja Modal Infrastruktur: Jika Serapan lambat Infrastruktur Terlambat.	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	450
23	Analisis RUU tentang APBN: Kerjasama Pemerintah dan Badan	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di	450

	Usaha Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Infrastruktur.	lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	
24	Analisis Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2015: Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015.	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	450
25	Analisis Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2015: Tinjauan Singkat Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015.	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	450
26	Analisis RUU APBN: Analisis Penyerapan Anggaran Dalam APBN.	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	150
27	Analisis RUU APBN: Analisis <i>Critical Note</i> Atas Capaian Pertumbuhan Kemiskinan, Pengangguran, Ketimpangan dan Pengendalian Inflasi.	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	150
28	Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dalam Usaha Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dari Sektor Kelautan dan Perikanan	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	450
29	Anggaran Kesehatan di BKKBN dan Badan POM.	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	450
30	Pembiayaan Infrastruktur.	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	450
31	Referensi Anggaran Kesehatan.	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	450
32	Referensi Anggaran Kesehatan, Indikator dan Saran Kesehatan.	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	450
33	Buletin Edisi 1-24.	Pimpinan DPR, Komisi Komisi Terkait, Anggota BURT, Pejabat di lingkungan BKD dan Sekjen, dan Analis.	325

B. Pencapaian Kinerja Pegawai

Pencapaian kinerja organisasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan akumulasi dari pencapaian target kinerja setiap pegawai yang ada pada Pusat Kajian Anggaran. Untuk tahun 2016, rata-rata perjanjian kinerja setiap pegawai di Pusat Kajian Anggaran adalah 91,28 persen. Target kinerja tidak mencapai 100 persen terjadi pada Analis APBN, karena salah satu produk

yang dikontrakan berdasarkan permintaan. Karena itu jika tidak ada permintaan maka target menjadi tidak terealisasi.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pegawai

No	Nama Pegawai	Target (Dokumen)	Realisasi (Dokumen)	Tingkat Pencapaian (%)
1	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.	54	56	103,74
2.	Mardi Harjo, S.E., M.Si.	1	1	100,00
3.	Achmad Ridho, S.E.	9	9	100,00
4.	Siti Rahmawati, S.E.	9	9	100,00
5.	Musbiyatun	9	9	100,00
6.	Memed Sobari	6	6	100,00
7.	Slamet Widodo, S.E., M.E.	14	14	100,00
8.	Handriyanto Setiadi, S.E., M.E.	14	9	64,29
9.	Rastri Paramita, S.E., M.M.	8	7	87,50
10.	Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.	8	7	87,50
11.	Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.	8	7	87,50
12.	Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.	8	7	87,50
13.	Dahiri, S.Si., M.Sc	8	7	87,50
14.	Marihot Nasution, S.E., M.Si.	8	7	87,50
15.	Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.	8	7	87,50
16.	Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.	8	7	87,50
17.	Ade Nurul Aida, S.E.	8	7	87,50
18.	Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M	8	7	87,50

C. Monitoring dan Evaluasi

Untuk pencapaian *output* Pusat Kajian Agggaran melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya sebagai bagian dari pelaksanaan TEPR, yaitu memonitoring pencapaian *output* sesuai dengan *output planning*. Dalam prakteknya keluarnya *Output* Perumusan Kebijakan selalu tepat sesuai dengan *output planning*-nya. Namun untuk *Output* Analisis keluarnya belum sepenuhnya sesuai dengan *output planning*-nya terutama yang terkait dengan jurnal, buku, *database* dan pengembangan profesi Analis APBN.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pencapaian target kinerja organisasi Pusat Kajian Anggaran dilakukan melalui kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan. Untuk itu pada tahun 2016 Pusat Kajian Anggaran menyusun berbagai rencana kegiatan yang dituangkan dalam Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran. Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran untuk tahun 2016 realisasinya mencapai 88,67 persen yang terbagi dalam dua sub kegiatan yaitu:

1. Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran; dan,
2. Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN.

A. Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran

Untuk mendukung sub kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran telah melaksanakan beberapa komponen kegiatan dengan realisasi penyelenggaraannya mencapai 85,26 persen.

1. Penyelenggaraan Koordinasi di Tingkat Unit Organisasi

Kegiatan koordinasi di lingkungan internal Pusat Kajian Anggaran dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan sesuai dengan perencanaan. Kegiatan koordinasi yang dilakukan selama tahun 2016 dilakukan sebanyak 40 kali atau 80 persen dari rencana dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pembahasan Revisi DIPA 2016 pada Kamis 7 Januari 2016;
- 2) Pembahasan Revisi DIPA 2016 lanjutan pada Jum'at 15 Januari 2016;
- 3) Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 pada Senin 18 Januari 2016;
- 4) Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 lanjutan pada Rabu 20 Januari 2016;
- 5) Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Rapat-Rapat pada Selasa 26 Januari 2016;
- 6) Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Rapat-Rapat lanjutan pada Jum'at 29 Januari 2016;
- 7) Pembahasan Rencana Kerja Bulan Maret 2016 pada Selasa 1 Maret 2016;
- 8) Pembahasan Agenda Kerja Bulan Maret 2016 pada Rabu 2 Maret 2016;
- 9) Pembahasan Agenda Kerja Bulan Maret 2016 lanjutan pada Selasa 8 Maret 2016;
- 10) Pembahasan SKP pada Senin 14 Maret 2016;
- 11) Pembahasan Persiapan Kunjungan Kerja ke Jerman pada Selasa 15 Maret 2016;

- 12) Pembahasan SKP pada Rabu 16 Maret 2016;
- 13) Pembahasan Persiapan Seminar dengan WFD pada Jum'at 18 Maret 2016;
- 14) Pembahasan Persiapan Seminar dengan WFD lanjutan pada Selasa 22 Maret 2016;
- 15) Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Maret dan Rencana Kerja Bulan April 2016 pada Jum'at 1 April 2016;
- 16) Pembahasan Penyampaian *Output* PKA dan KAKN ke AKD pada Senin 11 April 2016;
- 17) Pembahasan PMPRB Area Perubahan I pada Selasa 12 April 2016;
- 18) Pembahasan Alternatif Tema *Workshop* pada Jum'at 15 April 2016;
- 19) Pembahasan Revisi 3 DIPA PKA pada Senin 2 Mei 2016;
- 20) Pembahasan Persiapan Kunjungan Kerja ke Parlemen Kerajaan Inggris pada Senin 9 Mei 2016;
- 21) Pembahasan Persiapan Kunker ke Afrika Selatan pada Selasa 10 Mei 2016;
- 22) Pembahasan Revisi DIPA 3 PKA (lanjutan) pada Kamis 12 Mei 2016;
- 23) Pembahasan Rencana Kerja Bulan Juni 2016 pada Selasa 31 Mei 2016;
- 24) Pembahasan Pembahasan Kartu Kendali Surat pada Rabu 1 Juni 2016;
- 25) Pembahasan Disiplin Kerja Kamis pada 2 Juni 2016;
- 26) Pembahasan Rencana Kerja Bulan Juli 2016 pada Selasa 12 Juli 2016;
- 27) Pembahasan Rencana Kunjungan ke Parlemen Inggris pada Rabu 13 Juli 2016;
- 28) Pembahasan *Entry Data* soal TKB pada Kamis 28 Juli 2016;
- 29) Inventarisasi Permasalahan BKD pada Rabu 3 Agustus 2016;
- 30) Pembahasan Persiapan Kunjungan ke Jerman dan Inggris pada Selasa 30 Agustus 2016;
- 31) Pembahasan Pelaksanaan Pengumpulan Informasi Anjab, Evjab dan ABK pada Rabu 21 Sept 2016;
- 32) Pembahasan Tentang Rencana Kerja Pusat Kajian Anggaran Bulan Oktober 2016 pada Senin 3 Oktober 2016;
- 33) Pembahasan Rapat Tentang Analisis Beban Kerja pada Senin 10 Oktober 2016;
- 34) Pembahasan Pelaksanaan Pengumpulan Informasi Anjab, Evjab dan ABK Pusat Anggaran BKD Kajian pada Selasa 11 Oktober 2016;
- 35) Pembahasan DIPA Pusat Kajian Anggaran (Rincian Revisi 7 DIPA 2016) pada Kamis 13 Oktober 2016;
- 36) Pembahasan Revisi 7 DIPA 2016 pada Jumat 14 Oktober 2016;
- 37) Pembahasan Kepastian dan Implikasi Hukum Penyusunan RAPBD 2017 pada Senin 24 Oktober 2016.
- 38) Pembahasan Hasil *Output* PKA Sampai dengan Bulan November 2016 Rabu pada 30 November 2016;
- 39) Pembahasan Hasil *Output* PKA sampai dengan Bulan Desember 2016 pada Kamis 22 Desember 2016;
- 40) Pembahasan Hasil *Output* PKA Bulan Desember 2016 pada Jumat 23 Desember 2016;

2. Penyelenggaraan Koordinasi dengan Instansi Terkait/Pihak Terkait

Kegiatan koordinasi dengan instansi terkait/pihak terkait tetap dilakukan oleh Pusat Kajian Anggaran untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang berkaitan dengan instansi/pihak lain dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

Koordinasi ini dilakukan dengan pihak internal dan eksternal. Kegiatan koordinasi dengan instansi terkait/pihak terkait dilakukan sebanyak 23 kali dari 16 kali yang direncanakan atau 143,75 persen dari rencana dengan perincian sebagai berikut::

- 1) Pembahasan tentang Penyusunan Berita di Majalah Parlementaria pada Rabu 13 Januari 2016;
- 2) Pembahasan tentang Pembentukan Satker BKD pada Rabu 10 Februari 2016;
- 3) Pembahasan tentang Pembentukan Satker BKD pada Kamis 11 Februari 2016;
- 4) Pembahasan tentang Penyempurnaan TOR/*Policy Paper* Satker BKD pada Kamis 18 Februari 2016;
- 5) Pembahasan tentang Penyusunan Regulasi atau Peraturan Terkait Pembinaan Jabatan Fungsional Analis APBN pada Selasa 23 Februari 2016;
- 6) Pembahasan tentang Penyusunan Regulasi atau Peraturan Terkait Pembinaan Jabatan Fungsional Analis APBN lanjutan pada Kamis 17 Maret 2016;
- 7) Pembahasan tentang PMP RB Area Perubahan I pada Kamis 14 April 2016;
- 8) Pembahasan tentang PMP RB Area Perubahan I pada Senin 18 April 2016;
- 9) Pembahasan tentang PMP RB Area Perubahan I pada Selasa 19 April 2016;
- 10) Pembahasan tentang PMP RB Area Perubahan I pada Rabu 27 April 2016;
- 11) Rapat dengan *Clerk of Northern Ireland Assembly* pada Jum'at 29 April 2016;
- 12) Pembahasan tentang Jabatan Fungsional Analis APBN pada Senin 2 Mei 2016;
- 13) Pembahasan tentang Jabatan Fungsional Analis APBN pada Selasa 3 Mei 2016;
- 14) Pembahasan tentang Pengisian Catatan Harian PPKP pada Jum'at 13 Mei 2016;
- 15) Pembahasan tentang *Grand Design* BKD pada Jum'at 3 Juni 2016;
- 16) Pembahasan tentang Tugas di Komisi dan AKD pada Jum'at 15 Juli 2016;
- 17) Pembahasan tentang Penugasan dan Pemilahan Tugas Antara PKA dan P KAKN pada Kamis 21 Juli 2016;
- 18) Pembahasan tentang *Grand Design* BKD Bab I dan II pada Jum'at 22 Juli 2016;

- 19) Pembahasan tentang *Grand Design* BKD pada Jum'at 29 Juli 2016;
- 20) Pembahasan tentang Penyusunan Pidato APBN pada Kamis 4 Agustus 2016;
- 21) Pembahasan tentang Pembahasan *Grand Design* Matrik Rencana Aksi 5 Tahunan pada Jum'at 12 Agustus 2016;
- 22) Pembahasan tentang Pembahasan *Grand Design* Penguatan BKD pada Jum'at 26 Agustus 2016;
- 23) Pembahasan tentang *Grand Design* Penguatan BKD pada Jum'at 16 September 2016; dan,

3. Penyelenggaraan Penerimaan Delegasi DPRD Terkait Pelaksanaan UU APBN

Kegiatan penerimaan delegasi DPRD yang terkait dengan pelaksanaan UU APBN tetap dilakukan karena kegiatan ini biasa muncul setiap tahun karena DPRD-DPRD memerlukan informasi terkini terkait dengan APBN Induk maupun APBN Perubahan. Namun demikian terselenggaranya kegiatan ini sangat tergantung kepada kedatangan delegasi DPRD. Selama tahun 2016 kegiatan penerimaan delegasi DPRD dilakukan sebanyak 1 kali dari 1 kali yang direncanakan atau mencapai 100 persen yaitu Delegasi DPRD Kabupaten Luwu tanggal 27 Oktober 2016. Namun demikian bersama Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara menerima Delegasi DPRD Kabupaten Langkat tanggal 27 Desember 2016.

4. Penyusunan Rencana Kerja

Kegiatan penyusunan Rencana Kerja yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah untuk Tahun Anggaran 2017. Penyusunan tema rencana kerja dan kebutuhan anggarannya dilakukan berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan anggaran tahun 2016. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dilakukan 5 kali dari 4 kali yang direncanakan atau mencapai 125 persen dengan perincian berikut:

- 1) Pembahasan Renstra PKA 2016-2019 pada Senin 4 Januari 2016;
- 2) Penyusunan Renstra PKA 2016-2019 lanjutan pada Selasa 5 Januari 2016;
- 3) Penyusunan Renstra PKA 2016-2019 lanjutan pada Rabu 6 Januari 2016.
- 4) Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 pada Senin 18 Januari 2016;
- 5) Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 lanjutan pada Rabu 20 Januari 2016;

5. Penyusunan LAKIP

Kegiatan penyusunan LAKIP merupakan perwujudan dari akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Kajian Anggaran. Namun demikian. Penyusunan LAKIP yang dilakukan pada tahun 2016 adalah LAKIP Biro Analisa APBN Tahun Anggaran 2015.

6. Penyelenggaraan Praktek Terbaik Tata Kelola Pusat Kajian Anggaran

Pelaksanaan tata kelola terbaik (*good governance*) merupakan suatu keharusan bagi Pusat Kajian Anggaran. Penerapan tata kelola terbaik ini merupakan tugas yang tidak pernah berhenti dan harus selalu berorientasi kepada pencapaian profesionalitas dan akuntabilitas organisasi sebagaimana visi dari Pusat Kajian Anggaran yaitu, “Menjadi Pusat Kajian Anggaran sebagai organisasi pendukung DPR RI bidang keahlian anggaran yang profesional, andal, dan akuntabel.” Pelaksanaan tata kelola terbaik (*good governance*) ini dilakukan terhadap tatakelola sumber daya organisasi dan substansi.

Kegiatan Penyelenggaraan Praktek Terbaik Tata Kelola Pusat Kajian Anggaran dilakukan dalam bentuk Rapat di luar jam kerja dilakukan sebanyak 13 kali dari 12 kali yang direncanakan atau realisasi mencapai 108,33 persen dengan perincian berikut:

- 1) Pembahasan tentang Penyusunan Renstra pada Rabu 20 Januari 2016;
- 2) Pembahasan tentang Finalisasi Renstra pada Kamis 28 Januari 2016;
- 3) Pembahasan tentang Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) pada Kamis 4 Februari 2016;
- 4) Pembahasan tentang TOR tentang Manajemen SDM (Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap pada Badan Keahlian Dewan) pada Selasa 9 Februari 2016;
- 5) Pembahasan tentang Pembentukan Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan Badan Keahlian pada Jum'at 12 Februari 2016;
- 6) Pembahasan tentang Penyediaan Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) lanjutan pada Kamis 25 Februari 2016;
- 7) Pembahasan tentang Peraturan Sekjen tentang Rincian Tugas Pokok, Hasil Kerja dan Standar Kualitas Jabatan Analis APBN pada Jum'at 11 Maret 2016;
- 8) Pembahasan tentang Peraturan Sekjen tentang Rincian Tugas Pokok, Hasil Kerja dan Standar Kualitas Jabatan Analis APBN lanjutan pada Kamis 17 Maret 2016;
- 9) Pembahasan tentang Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada Senin, 28 Maret 2016;
- 10) Pembahasan tentang Kompetensi Jabatan Analis APBN pada Senin 4 April 2016;
- 11) Pembahasan tentang Penyelesaian Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) pada Senin 11 April 2016;
- 12) Pembahasan tentang Rician Tugas Pokok, Hasil Kerja dan Standar Kualitas Jabatan Analis APBN pada Kamis 21 April 2016;
- 13) Pembahasan tentang Penyelesaian Soal Tes Kompetensi Bidang pada Selasa 26 April 2016;

Untuk mendukung 6 kegiatan diatas didukung dengan penyelenggaraan diskusi sebanyak 4 kali. Namun untuk tahun 2016 belum dilakukan atau realisasi 0 persen. Begitu juga untuk memperluas wawasan pegawai Pusat

Kajian diikuti dalam kegiatan *workshop* sebanyak 5 kali dari 4 kali yang direncanakan atau mencapai 125 persen, yaitu:

- 1) *Comparative Legislative Drafting Process The UK and Indonesian System*, Jakarta 24 Februari 2016;
- 2) Prediksi Ekonomi Indonesia Pasca MEA, Bandung 15-17 April 2016;
- 3) Pembangunan Perikanan dan Kelautan Dalam Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional, Lampung 16 – 18 Mei 2016;
- 4) *Archipelago Tourism, Marine Tourism in Archipelagic Hemisphere*, UGM Jogja 28 September - 1 Oktober 2016; dan,
- 5) Meretas Jalan Pembangunan Berkelanjutan Global, UGM Jogja 20-22 November 2016.

Disamping untuk dukungan SDM pada tahun 2016 akan dilakukan rekrutmen PTT tetapi belum dilaksanakan karena ada perubahan kebijakan (realisasi 0 persen).

B. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN

Untuk mendukung sub kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN dilakukan beberapa komponen kegiatan dengan realisasi penyelenggaraannya mencapai 92,07 persen.

1. Penyusunan Analisis

Penyusunan analisis APBN dilakukan berdasarkan siklus APBN sebagai bagian produk utama pelayanan kajian anggaran kepada DPR RI. Analisis APBN merupakan produk Pusat Kajian Anggaran yang diterbitkan sesuai dengan siklus pembahasan APBN. Tujuan penerbitan analisis APBN adalah untuk memberi masukan/input bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi Anggarannya, khususnya dalam rangka pembahasan APBN.

Analisis yang dihasilkan merupakan kajian tematik yang didukung data dan informasi primer/sekunder atas topik terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBN. Analisis menitikberatkan pada upaya pemecahan masalah (rekomendasi) atas topik tertentu berdasarkan pada data dan informasi terkini, sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan di bidang anggaran. Karena tema rencana kerja tahun 2016 adalah mempertajam Analisis Politik Anggaran APBN, maka rekomendasi yang dihasilkan mengarah kepada prioritas alokasi anggaran, distribusi dan stabilisasi.

Kegiatan yang terkait dengan penyusunan analisis adalah:

- 1) Rapat penyusunan analisis dilakukan 4 kali dari 28 kali yang direncanakan atau realisasi mencapai 14,23 persen dengan perincian berikut:
 - (1) Pembahasan Tema Analisis APBNP 2016 pada Senin 29 Februari 2016;
 - (2) Presentasi Analisis Siklus Pendahuluan APBN pada Rabu 25 Mei 2016;

- (3) Presentasi Analisis Siklus APBNP pada Kamis 26 Mei 2016;
- (4) Tim Koordinasi Analisis pada Senin 15 Agustus 2016;
- 2) Diskusi pakar dilakukan 16 kali dari 28 kali yang direncanakan atau 57,14 persen dengan perincian berikut:
 - (1) Diskusi tentang Penyusunan Regulasi atau Peraturan Terkait Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis APBN pada 23 Februari 2016;
 - (2) Diskusi tentang Melorotnya Penerimaan Pajak: Pencarian Cadangan Minyak Baru Solusinya pada Rabu 4 Mei 2016;
 - (3) Diskusi tentang Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan pada Senin 16 Mei 2016;
 - (4) Diskusi tentang Kebijakan Subsidi Energi Tepat Sasaran dengan Tetap Mempertahankan Daya Beli Masyarakat pada Selasa 17 Mei 2016;
 - (5) Diskusi tentang Pembangunan Infrastruktur Berdimensi Kewilayahan Untuk Atasi Kesenjangan Pembangunan Antar Daerah pada Rabu 18 Mei 2016;
 - (6) Diskusi tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017 pada Kamis 19 Mei 2016;
 - (7) Diskusi tentang *Holding* Badan Usaha Milik Negara pada Selasa 23 Agustus 2016;
 - (8) Diskusi tentang Pembiayaan Infrastruktur pada Rabu 24 Agustus 2016;
 - (9) Diskusi tentang Penjajakan Kerjasama untuk Keterbukaan Data dan Informasi Terkait APBN pada Kamis 25 Agustus 2016;
 - (10) Diskusi tentang Anggaran Kesehatan di Kementerian Kesehatan, BKKBN dan BPOM Tahun 2016 dan 2017 pada Kamis 1 September 2016;
 - (11) Diskusi tentang Pemangkasan Anggaran APBN 2016: Pentingkah? pada Kamis 22 September 2016
 - (12) Diskusi tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK: Antara Keharusan dan Kenyataan pada Kamis 20 Oktober 2016;
 - (13) Diskusi tentang Perkembangan Realisasi Anggaran Dalam APBN pada Jum'at 25 November 2016;
 - (14) Diskusi tentang Pekerjaan Rumah Pemerintah Terkait Pembangunan Ekonomi ke Depan pada Selasa 29 November 2016;
 - (15) Diskusi tentang Upaya Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Pendidikan pada Kamis 1 Desember 2016;
 - (16) Diskusi tentang Pekerjaan Rumah Pemerintah Terkait Pembangunan Ekonomi ke Depan pada Senin 5 Desember 2016.

Untuk mendukung penyusunan analisis didukung dengan kegiatan pencarian data sebanyak 5 kali atau mencapai 100 persen yaitu:

- 1) Pengumpulan Data Ke Kota Kebumen pada 1-4 Maret 2016;
- 2) Pengumpulan Data Ke Kota Mataram NTB pada 14-17 Maret 2016;

- 3) Pengumpulan Data Ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara pada 11-14 April 2016;
- 4) Pengumpulan Data ke Kota Padang Sumatera Barat tanggal 10-13 Mei 2016;
- 5) Pengumpulan Data ke Ambon Maluku tanggal 31 Mei-3 Juni 2016;

2. Penyusunan Referensi

Penyusunan referensi merupakan bagian produk utama pelayanan kajian anggaran kepada DPR RI. Referensi merupakan kompilasi data dan informasi primer/sekunder yang diolah atas topik terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBN. Referensi lebih bersifat menyajikan data dan informasi tanpa memasukkan pertimbangan/analisis dari penulis (Analisis APBN). Pada tahun 2016, referensi yang dihasilkan mengarah kepada data dan informasi primer/sekunder tentang alokasi anggaran, distribusi dan stabilisasi yang diolah. Kegiatan yang terkait dengan penyusunan analisis adalah:

- 1) Pengumpulan data ke BI pada tanggal 9 Mei 2016;
- 2) Pengumpulan data ke Kementerian Kesehatan tanggal 14 September 2016;
- 3) Pengumpulan data ke BPS tanggal 15 September 2016;

Untuk kegiatan penyusunan referensi didukung dengan kegiatan rapat pembahasan dan diskusi sebanyak 10 kali tetapi untuk tahun 2016 kegiatan diskusi belum bisa dilaksanakan atau 0 persen penyelenggaraan kegiatannya.

3. Penyusunan Buletin APBN/Analisa Ringkas Cepat (ARC)

Penyusunan Buletin APBN merupakan bagian produk utama pelayanan kajian anggaran kepada DPR RI. Buletin merupakan analisis yang diterbitkan 2 kali sebulan dengan tujuan untuk menyebarkan informasi terkini terkait kebijakan keuangan negara (APBN) yang ditujukan kepada internal DPR RI serta pihak lain yang membutuhkan. Tema buletin difokuskan pada isu-isu terkini APBN dalam kurun waktu 2 minggu sebelum dipublikasikan. Kegiatan yang terkait dengan penyusunan buletin APBN/ARC dilakukan 42 kali atau 105 persen dengan perincian:

- 1) Pembahasan Persiapan Penyusunan Buletin pada Senin 11 Januari 2016;
- 2) Penyusunan *Outline* Buletin APBN pada Kamis 14 Januari 2016;
- 3) Pembahasan Draft Buletin APBN pada Jum'at 22 Januari 2016;
- 4) Presentasi Buletin Edisi ke 2 pada Jum'at 5 Februari 2016;
- 5) Penentuan Tema Buletin pada Jum'at 12 Februari 2016;
- 6) Presentasi Artikel Buletin Edisi 3 pada Senin, 22 Februari 2016;
- 7) Penentuan Tema Buletin Edisi 4 pada Kamis, 25 Februari 2016;
- 8) Presentasi Buletin Edisi ke 4 pada Senin 7 Maret 2016;
- 9) Penentuan Tema dan *Outline* Buletin edisi ke 5 pada Kamis 10 Maret 2016;

- 10) Presentasi Buletin Edisi ke 5 (lanjutan) pada Senin 21 Maret 2016;
- 11) Penentuan Tema Buletin edisi ke 6 pada Senin, 28 Maret 2016;
- 12) Presentasi Buletin Edisi ke 6 pada Selasa 4 April 2016;
- 13) Presentasi Buletin edisi ke 7 pada Rabu 20 April 2016;
- 14) Penentuan Tema dan Outline Buletin Edisi ke 8 pada Kamis 21 April 2016;
- 15) Presentasi Buletin Edisi ke 8 pada Selasa 3 Mei 2016;
- 16) Presentasi Buletin Edisi ke 9 pada Rabu 4 Mei 2016;
- 17) Presentasi Buletin Edisi ke 9 pada Senin 16 Mei 2016;
- 18) Presentasi Buletin Edisi ke 10 pada Kamis 19 Mei 2016;
- 19) Presentasi Buletin Edisi ke 10 pada Senin 30 Mei 2016;
- 20) Penentuan Tema/*Outline* Buletin Edisi ke 14 pada Kamis 14 Juli 2016;
- 21) Presentasi *Outline* Buletin Edisi 13 pada Senin 18 Juli 2016;
- 22) Presentasi *Outline* Buletin Edisi 14 pada Senin 25 Juli 2016;
- 23) Presentasi Buletin Edisi ke 15 pada Senin 8 Agustus 2016;
- 24) Presentasi Buletin Edisi ke 16 pada Rabu 10 Agustus 2016;
- 25) Presentasi Buletin Edisi ke 16 pada Senin 22 Agustus 2016;
- 26) Presentasi Buletin Edisi ke 17 pada Senin 5 September 2016;
- 27) Presentasi Buletin Edisi ke 18 pada Jum'at 9 September 2016;
- 28) Presentasi Buletin Edisi ke 18 pada Senin 19 September 2016;
- 29) Presentasi Buletin Edisi ke 19 pada Senin 26 September 2016;
- 30) Rapat Tentang Presentasi Buletin Edisi-18 pada Selasa 4 Oktober 2016;
- 31) Rapat Tentang *Outline* Buletin Edisi-20 pada Jumat 7 Oktober 2016;
- 32) Rapat Tentang Presentasi Buletin Edisi-20 pada Senin 17 Oktober 2016;
- 33) Rapat Tentang Presentasi Buletin Edisi-20 lanjutan pada Selasa 18 Oktober 2016;
- 34) Rapat Tentang Tema dan *Outline* Buletin Edisi Ke 21 pada Rabu 26 Oktober 2016;
- 35) Rapat Presentasi Buletin Edisi-21 pada Senin 31 Oktober 2016;
- 36) Rapat *Outline* Buletin Edisi-22 pada Jumat 4 November 2016;
- 37) Rapat Presentasi Buletin Edisi-22 pada Senin 14 November 2016;
- 38) Rapat Presentasi *Outline* Buletin Edisi-23 pada Kamis 17 November 2016;
- 39) Rapat Presentasi Buletin Edisi-23 pada Senin 28 November 2016;
- 40) Rapat Analisa Beban Kerja pada Jum'at 2 Desember 2016;
- 41) Rapat Presentasi Buletin Edisi ke 24 pada Rabu 7 Desember 2016; dan,
- 42) Lanjutan Presentasi Buletin Edisi ke 24 pada Kamis, 8 Desember 2016.

Sementara itu untuk ARC kegiatannya dilakukan secara individual Analisis APBN.

4. Penerbitan Jurnal

Penerbitan jurnal sebagai bagian produk utama pelayanan kajian anggaran kepada DPR RI. Penerbitan jurnal "Budget" di tahun 2016 merupakan tahun pertama. Tema yang diangkat dalam setiap volumenya selalu berbeda-beda sesuai dengan tema yang penting dalam APBN. Untuk

tahun 2016, tema penerbitan jurnal mengarah kepada makro ekonomi dan perekonomian regional.

Kegiatan yang terkait dengan penerbitan jurnal adalah:

- 1) Rapat redaksi dilakukan 2 kali atau 25 persen dengan rincian:
 - (1) Membahas Tema Jurnal Asumsi Dasar Ekonomi Makro pada Kamis 9 Juni 2016;
 - (2) Membahas Tema Jurnal Asumsi Dasar Ekonomi Makro pada Rabu 22 Juni 2016.
- 2) Diskusi dengan reviewer dilakukan 4 kali dari 4 kali yang direncanakan atau mencapai 100 persen, yaitu:
 - (1) Diskusi tentang Diskusi Jurnal Asumsi Dasar Ekonomi Makro pada Kamis 9 Juni 2016;
 - (2) Diskusi tentang Diskusi Jurnal Asumsi Dasar Ekonomi Makro pada Rabu 22 Juni 2016;
 - (3) Diskusi tentang Pengaruh Sumber-Sumber PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Jum'at 11 November 2016; dan,
 - (4) Diskusi tentang Review Jurnal Edisi ke 2 pada Rabu 23 November 2016.

5. Penerbitan Buku Kajian yang terkait APBN dan Pengetahuan tentang APBN

Tujuan pembuatan buku adalah untuk menyediakan referensi dalam bentuk buku bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi Anggarannya, khususnya dalam rangka pembahasan APBN. Selain itu, penerbitan juga bertujuan sebagai wadah pengembangan SDM di lingkungan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dan sebagai wadah *transfer knowledge* dengan pihak eksternal.

Buku terkait APBN merupakan produk Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang isi/ konten utamanya adalah isu/permasalahan/ kajian/reviu kebijakan yang harus terkait dengan APBN dan Indikator Makro Ekonomi. Untuk menghasilkan buku telah dilakukan kegiatan berikut:

- 1) Rapat koordinasi penerbitan dilakukan 11 kali dari 5 kali yang direncanakan atau mencapai 220 persen dengan rincian berikut:
 - (1) Presentasi Buku Kesehatan pada Rabu 27 Juli 2016;
 - (2) Presentasi Buku Bunga Rampai APBN pada Senin 1 Agustus 2016;
 - (3) Presentasi Buku Tinjauan Sosio Politik dan Ekonomi Kebijakan Pemekaran Daerah pada Selasa 2 Agustus 2016;
 - (4) Presentasi kedua Buku Bunga Rampai APBN pada Jum'at 5 Agustus 2016;
 - (5) Presentasi ketiga Buku Bunga Rampai APBN pada Selasa 9 Agustus 2016;
 - (6) Finalisasi Buku Kesehatan pada Jum'at 19 Agustus 2016;
 - (7) Presentasi Buku Bunga Rampai APBN pada Jum'at 12 Agustus 2016;
 - (8) Presentasi Buku Bunga Rampai, Isu-isu Pembangunan Ekonomi pada Jum'at 20 Agustus 2016;

- (9) Presentasi Buku Bunga Rampai, Isu-isu Pembangunan Ekonomi pada Rabu 14 September 2016;
 - (10) Presentasi Buku Bunga Rampai, Isu-isu Pembangunan Ekonomi pada Kamis 15 September 2016;
 - (11) Presentasi Buku Bunga Rampai, Isu-isu Pembangunan Ekonomi pada Jum'at 21 September 2016.
- 2) Diskusi dengan pakar dilaksanakan 3 kali dari yang 1 kali yang direncanakan atau mencapai 300 persen yaitu:
- (1) Diskusi tentang Otonomi Anggaran Parlemen pada Rabu 2 November 2016;
 - (2) Diskusi tentang Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) pada Senin 7 November 2016.
 - (3) Diskusi tentang Analisis Sistem Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah pada Kamis 10 November 2016;

6. Penyusunan Database

Penyusunan database diperlukan sebagai penyediaan data dan informasi yang handal, valid, dan akurat untuk penyediaan produk Analisis, Referensi, dan Buletin APBN, Jurnal dan Buku. Untuk mendapatkan data dan informasi tersebut dilakukan pencarian/penggalian data ke daerah. Pemilihan daerah ditentukan berdasarkan keterwakilan daerah terhadap isu yang akan diangkat menjadi tema kajian tahun 2016. Adapun daerah yang dikunjungi 3 tempat atau sesuai dengan yang direncanakan (mencapai 100 persen) adalah:

- 1) Pengumpulan Data ke Kota Manado Sulawesi Utara tanggal 31 Mei-3 Juni 2016;
- 2) Pengumpulan Data ke Kota Bandung Jawa Barat tanggal 27-30 September 2016;
- 3) Pengumpulan Data ke Kota Cirebon Jawa Barat tanggal 30 November-2 Desember 2016.

Dalam mendukung pencarian/penggalian data ke daerah telah dilakukan 7 kali dari 12 kali yang direncanakan atau mencapai 58,33 persen dengan perincian:

- 1) Pembahasan tentang Persiapan Pengumpulan Data ke Daerah pada Selasa 9 Feb 2016;
- 2) Pembahasan tentang Persiapan Pengumpulan Data ke Mataram pada Jum'at 11 Maret 2016;
- 3) Pembahasan tentang Evaluasi Pengumpulan Data ke Kota Mataram pada Selasa 29 Maret 2016;
- 4) Pembahasan tentang Evaluasi Pengumpulan Data ke Kebumen pada Rabu 30 Maret 2016;
- 5) Pembahasan tentang Pengumpulan Data ke Daerah Kota Kendari pada Jum'at 8 April 2016;
- 6) Pembahasan tentang Evaluasi Pengumpulan Data Kendari Rabu pada 11 Mei 2016;

- 7) Pembahasan tentang Persiapan Pengumpulan Data ke Daerah untuk Jurnal pada Selasa 13 September 2016.

Untuk mendukung pengembangan *database* APBN didukung dengan kegiatan pengadaan *software*, tetapi untuk tahun 2016 belum dilakukan (realisasi 0 persen).

7. Pengembangan Profesi Analis APBN

Pengembangan Profesi Analis APBN merupakan bagian dari penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan instrumen profesi Analis APBN. Pengembangan kompetensi berupa penyelenggaraan 3 kali *workshop* atau mencapai 100 persen yaitu:

- 1) Menggali Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 23 Mei 2016;
- 2) Menuju Otonomi Anggaran: Dinamika dan Kebutuhan Kemandirian Pengelolaan Keuangan Negara pada 24 Mei 2016;
- 3) Mencari Peta Jalan Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Untuk Mengatasi Ketimpangan Antar Wilayah pada 30 Mei 2016.

Disamping itu untuk memperluas wawasan pegawai Pusat Kajian diikutkan dalam kegiatan *workshop* sebanyak 1 kali dari 1 kali yang direncanakan atau mencapai 100 persen. *Workshop* yang dimaksudkan adalah tentang, "Pemberdayaan Sektor Riil Melalui Pengembangan Keuangan Inklusif," pada 12-14 April 2016 di Sleman.

Adapun studi banding kunjungan ke luar negeri dilakukan 2 kali dari 3 kali atau mencapai 66,66 persen yang direncanakan yaitu:

- 1) Kunjungan ke Inggris 13-19 September 2016; dan,
- 2) Kunjungan ke Jerman 4-10 September 2016.

Sebagai tambahan pada tahun 2016 Pusat Kajian Anggaran juga menerima Delegasi Kedutaan Besar Jepang tanggal 20 Desember 2016 yang membicarakan tentang Sistem Penganggaran Negara Jepang.

Sementara untuk Pengembangan Instrumen profesi Analis APBN telah dilakukan 3 kali diskusi dari 4 kali yang direncanakan atau realisasi kegiatan 75 persen dengan rincian berikut:

- 1) Diskusi tentang Penyusunan Regulasi atau Peraturan Terkait Pembinaan Jabatan Fungsional Analis APBN pada Kamis 17 Maret 2016;
- 2) Diskusi tentang *Entry Data Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) Analis APBN ke Soft File Aplikasi* pada Jum'at 28 Juli 2016;
- 3) Diskusi tentang Penjajakan Kerjasama untuk Keterbukaan Data dan Informasi Terkait APBN pada Jum'at 26 Agustus 2016;

Begitu juga untuk Pengembangan Instrumen profesi Analis APBN telah dilakukan pembahasan atau rapat di luar jam kerja sebanyak 44 kali dari 29 kali atau mencapai 151,72 persen, yaitu dengan tema-tema:

- 1) Pembahasan tentang Rincian Tugas Pokok, Hasil Kerja dan Standar Kualitas Jabatan Analis APBN pada Selasa 3 Mei 2016;
- 2) Pembahasan tentang Penyelesaian Soal Tes Kompetensi Bidang pada Rabu 4 Mei 2016;
- 3) Pembahasan tentang Pedoman dan Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional pada Kamis 12 Mei 2016;
- 4) Pembahasan tentang Pedoman dan Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional pada Jum'at 13 Mei 2016;
- 5) Pembahasan tentang Pedoman dan Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional pada Senin 16 Mei 2016;
- 6) Pembahasan tentang Pedoman dan Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional pada Kamis 19 Mei 2016;
- 7) Pembahasan tentang Pedoman dan Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional pada Kamis 26 Mei 2016;
- 8) Pembahasan tentang Pedoman dan Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional pada Senin 30 Mei 2016;
- 9) Pembahasan tentang Pedoman Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kamis 2 Juni 2016
- 10) Pembahasan tentang Pedoman Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Rabu 8 Juni 2016
- 11) Pembahasan tentang Pedoman Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kamis 9 Juni 2016;
- 12) Pembahasan tentang Senin, 13 Juni 2016 Pembahasan Penyelesaian Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB);
- 13) Pembahasan tentang Rabu, 15 Juni 2016 Pembahasan Penyelesaian Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB);
- 14) Pembahasan tentang Pembahasan Penyelesaian Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) pada Senin, 20 Juni 2016;
- 15) Pembahasan tentang Pembahasan Penyelesaian Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) pada Selasa, 21 Juni 2016;
- 16) Pembahasan tentang Pembahasan Penyelesaian Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) pada Rabu 29 Juni 2016;
- 17) Pembahasan tentang Pembahasan Penyelesaian Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) pada Kamis 30 Juni 2016;
- 18) Pembahasan tentang Pembahasan Penyelesaian Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) pada Kamis 21 Juli 2016;
- 19) Pembahasan tentang Pembahasan Penyelesaian Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) pada Rabu, 27 Juli 2016;
- 20) Pembahasan tentang Finalisasi Pembahasan Peraturan Sekjen tentang Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis APBN pada Kamis 11 Agustus 2016;
- 21) Pembahasan tentang Penyelesaian Soal TKB pada Rabu 24 Agustus 2016;

- 22) Pembahasan tentang Pembahasan Persekjen tentang Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis APBN pada Kamis 25 Agustus 2016;
- 23) Pembahasan tentang Pembahasan Peraturan Sekjen tentang Pengangkatan dari Jabatan Lain untuk Menjadi Analis APBN pada Kamis 1 September 2016;
- 24) Pembahasan tentang Pembahasan Peraturan Sekjen tentang Pengangkatan dari Jabatan Lain untuk Menjadi Analis APBN pada Jum'at 2 September 2016;
- 25) Pembahasan tentang Kuesioner Oleh Tim Kecil atas Pelaksanaan Survey Tingkat Kepuasan Layanan Terkait Indikator Kinerja Utama Setjen dan BKD pada Rabu 21 September 2016;
- 26) Pembahasan tentang Analisis Beban Kerja Pusat Kajian Anggaran pada Rabu 5 Oktober 2016;
- 27) Pembahasan tentang Analisis Beban Kerja Pusat Kajian Anggaran pada Kamis 6 Oktober 2016;
- 28) Pembahasan tentang Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan Pusat Kajian Anggaran pada Rabu 12 Oktober 2016;
- 29) Pembahasan tentang Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan Pusat Kajian Anggaran pada Kamis 13 Oktober 2016;
- 30) Pembahasan tentang Analisa Beban Kerja Pengadimistrasi Umum pada Selasa 18 Oktober 2016;
- 31) Pembahasan tentang Analisa Beban Kerja Analis Muda pada Rabu 19 Oktober 2016;
- 32) Pembahasan tentang Persiapan Penerimaan Pegawai Analis Non Fungsional (Kontraktual) PKA pada Kamis 20 Oktober 2016;
- 33) Pembahasan tentang Peraturan Sekjen tentang Pengangkatan dari Jabatan Lain Untuk Menjadi Analis APBN pada Rabu 26 Oktober 2016.
- 34) Pembahasan tentang Peraturan Sekjen tentang Pengangkatan dari Jabatan Lain Untuk Menjadi Analis APBN pada Kamis 27 Oktober 2016;
- 35) Pembahasan tentang Peraturan Sekjen tentang Pengangkatan dari Jabatan Lain Untuk Menjadi Analis APBN pada Rabu 2 November 2016;
- 36) Pembahasan tentang Peraturan Sekjen tentang Pengangkatan dari Jabatan Lain Untuk Menjadi Analis APBN pada Kamis 3 November 2016;
- 37) Pembahasan tentang Review dan Revisi Persekjen tentang Kompetensi Analisis APBN pada Rabu 9 November 2016;
- 38) Pembahasan tentang Review dan Revisi Persekjen tentang Kompetensi Analisis APBN pada Kamis 10 November 2016;
- 39) Pembahasan tentang Finalisasi Pembahasan Persekjen tentang Pengangkatan dari Jabatan Lain pada Rabu 16 November 2016;
- 40) Pembahasan tentang Kamis, 17 November 2016 Finalisasi Pembahasan Persekjen tentang Pengangkatan dari Jabatan Lain;
- 41) Pembahasan tentang Penyusunan Kurikulum/Satuan Acara Pendidikan dan Pelatihan pada Senin 28 November 2016;
- 42) Pembahasan tentang Penyusunan Kurikulum/Satuan Acara Pendidikan dan Pelatihan pada Selasa 29 November 2016;

- 43) Pembahasan tentang Survey Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan BKD dan Setjen DPR RI pada Rabu 30 November 2016; dan,
 44) Pembahasan tentang Survey Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan BKD dan Setjen DPR RI pada Kamis 1 Desember 2016.

C. Monitoring dan Evaluasi

1. Pengisian Catatan Harian

Dalam rangka monitoring atas pencapaian target kinerja *output*, maka monitoring atas pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemantauan terhadap catatan harian setiap pegawai di lingkungan Pusat Kajian. Selama tahun 2016 rata-rata pegawai yang mengisi catatan harian tepat waktu mencapai 44,44 persen.

Tabel 3.1. Pengisian Catatan Harian Pegawai

Kriteria Waktu	Jumlah Pegawai	Pesentase
Pengisian Catatan Harian Tepat Waktu	8	44,44
Pengisian Catatan Harian Terlambat	6	33,33
Pengisian Catatan Harian Sangat Terlambat	4	22,23
Total	18	100,00

2. Monitoring dan Evaluasi

Untuk realisasi kegiatan, Pusat Kajian Agggaran melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya sebagai bagian dari pelaksanaan TEPRRA, yaitu memonitoring pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *output and cash planning*. Dalam prakteknya realisasi kegiatan belum sesuai dengan jadwal *output and cash planning* bulanannya.

BAB IV REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kajian Anggaran selama tahun 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.980.111.000 yang terdiri dari:

1. Anggaran kegiatan Perumusan Kebijakan sebesar Rp.537.659.300; dan,
2. Anggaran kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN sebesar Rp.3.442.451.700.

Adapun realisasinya adalah sebesar Rp.3.625.916.900 atau mencapai 91,10 persen. Adapun rincian lebih lanjut dijelaskan pada sub-sub bagian berikut.

A. Realisasi Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan

Anggaran kegiatan Perumusan Kebijakan dialokasikan sebesar Rp537.659.300 tetapi dalam pelaksanaannya yang terealisasi sebesar Rp413.967.000. Dengan demikian penyerapannya adalah sebesar 76,99 persen. Adapun rincian dari dijelaskan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran Tahun Anggaran 2016

		Pagu	Realisasi
051	Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran	537.659.300	413.967.000
A.	Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran	537.659.300	413.967.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	156.708.000	150.962.000
521211	Belanja Bahan	30.720.000	30.720.000
522151	Belanja Jasa Profesi	27.300.000	24.300.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	98.931.300	91.885.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	144.000.000	116.100.000

B. Realisasi Anggaran Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN

Anggaran kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN dialokasikan sebesar Rp3.442.451.700, tetapi dalam pelaksanaannya yang terealisasi sebesar Rp3.224.423.400. Dengan demikian penyerapannya adalah sebesar 93.66 persen. Adapun rincian dari dijelaskan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN Pusat Kajian Anggaran Tahun Anggaran 2016

		Pagu	Realisasi
052	Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	3.442.451.700	3.224.423.400
A.	Penyusunan Analisis/Referensi/Laporan APBN	3.442.451.700	3.224.423.400
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	670.517.000	588.880.000
521213	Honor Output Kegiatan	129.450.000	130.800.000
522151	Belanja Jasa Profesi	151.900.000	124.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	105.830.900	105.473.500
B.	Penerbitan Karya Tulis Ilmiah dan Bahan Diklat APBN	529.474.700	471.859.700
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	325.800.000	304.535.000
521213	Honor Output Kegiatan	157.650.000	124.150.000
522151	Belanja Jasa Profesi	39.200.000	36.500.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	4.724.700	4.724.700
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000	1.950.000
C.	Penyelenggaraan Database	199.700.000	187.449.700
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	19.700.000	11.200.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	175.000.000	173.517.400
536111	Belanja Modal Lainnya	5.000.000	2.732.300
D.	Pengembangan Profesi Analis APBN	1.655.579.100	1.615.960.500
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	49.640.000	30.400.000
521211	Belanja Bahan	92.540.000	90.870.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8.340.000	6.750.000
521213	Honor Output Kegiatan	16.950.000	16.050.000
522151	Belanja Jasa Profesi	53.861.100	38.400.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000	0
524111	Belanja Perjalanan Biasa	9.332.000	9.234.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	348.000.000	351.300.000
524219	Belanja Perjalanan Lainnya (LN)	1.076.616.000	1.072.956.500

C. Monitoring dan Evaluasi

Untuk realisasi anggaran, Pusat Kajian Anggaran melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya sebagai bagian dari pelaksanaan TEPR, yaitu memonitoring pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *output and cash planning*. Dalam prakteknya realisasi anggaran belum sesuai dengan *cash planning* bulannya.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk menjalankan tupoksinya, Pusat Kajian Anggaran didukung oleh 18 orang pegawai seperti yang dijelaskan pada tabel 5.1. Dari 18 orang pegawai tersebut, terdiri dari 1 Pejabat Tinggi Pratama, 5 orang Pejabat Administrasi (1 Pegawai dan 4 Pelaksana) dan 12 orang Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) Analis APBN. Dilihat dari perbandingan antara JFT dan Non JFT belum seimbang (hanya 5:1) karena idealnya jumlah JFT harus lebih banyak, minimal 10:1. Begitu juga dilihat dari keberadaan SDM secara kuantitas belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan analisis APBN kepada Dewan sehingga harus ditingkatkan. Dilihat dari jumlah Analis APBN) sebanyak 12 orang masih jauh dari rekomendasi Konsultan World Bank sebanyak 60 orang.

Tabel 5.1 Jumlah Pegawai

No	Jenis Jabatan	Total
1	Pejabat Tinggi Pratama	1
2	Pengawas	1
3	Pelaksana	4
4	Analisis APBN	12
	Total	18

Pencapaian target kinerja tahun 2016 tidak cukup didukung dengan anggaran tetapi juga dengan keberadaan SDM, peran SDM ini terlihat dari kedisiplinan dan pengembangan kompetensi.

A. Disiplin Pegawai

Disiplin pegawai dilihat dari ketidakhadiran tanpa alasan (alpa), dan bekerja tidak sesuai dengan jumlah kerja yang dilihat berdasarkan keterlambatan (TL=Terlambat) dan pulang lebih dulu (PSW=Pulang Sebelum Waktu). Selama periode Januari-November 2016, dari 18 pegawai pelanggaran jam kerja tertinggi adalah 74,39 hari dan terendah 0,03 hari. Berdasarkan tingkat kedisiplinan ini maka yaitu rata-rata pelanggaran jam kerja adalah 5,49 hari atau 1,6 hari (tanpa memasukkan Handriyanto Setiadi, S.E., M.E).

Adapun yang telah dijatuhkan sanksi adalah satu orang pegawai yaitu Handriyanto Setiadi, S.E., M.E berupa Teguran tertulis BK/01/PA/06/2016, 04-08-2016, dan sekarang sedang dalam proses penanganan Tim Disiplin. Dengan diberikannya sanksi disiplin kepada satu pegawai, maka Pusat Kajian Anggaran termasuk rendah karena hanya 5,5 persen.

Tabel 5.2. Tingkat Kedisiplinan Periode Januari-November 2016

No	Nama Pegawai	Kedisiplinan		
		Alpa	TL/PSW	Total
1	Handriyanto Setiadi, S.E., M.E.	277,5 Jam (37 Hari)	280,45 Jam (37,39 Hari)	557,95 Jam (74,39 Hari)
2.	Dahiri, S.Si., M.Sc	0 Jam (0 Hari)	30,13 Jam (3,96 Hari)	30,13 Jam (3,96 Hari)
3.	Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M	0 Jam (0 Hari)	28,8 Jam (3,84 Hari)	28,8 Jam (3,84 Hari)
4.	Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.	15 Jam (2 Hari)	8,32 Jam (1,11 Hari)	23,32 Jam (3,11 Hari)
5.	Slamet Widodo, S.E., M.E.	0 Jam (0 Hari)	18,07 Jam (2,41 Hari)	18,07 Jam (2,41 Hari)
6.	Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.	15 Jam (2 Hari)	15,42 Jam (0,06 Hari)	15,42 Jam (2,06 Hari)
7.	Ade Nurul Aida, S.E.	0 Jam (0 Hari)	12,24 Jam (1,63 Hari)	12,24 Jam (1,63 Hari)
8.	Achmad Ridho, S.E.	0 Jam (0 Hari)	11,97 Jam (1,60 Hari)	11,97 Jam (1,60 Hari)
9.	Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.	0 Jam (0 Hari)	7,15 Jam (0,95 Hari)	7,15 Jam (0,95 Hari)
10.	Memed Sobari	0 Jam (0 Hari)	6,30 Jam (0,84 Hari)	6,30 Jam (0,84 Hari)
11.	Mardi Harjo, S.E., M.Si.	0 Jam (0 Hari)	5,83 Jam (0,78 Hari)	5,83 Jam (0,78 Hari)
12.	Musbiyatun	0 Jam (0 Hari)	5,15 Jam (0,69 Hari)	5,15 Jam (0,69 Hari)
13.	Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.	0 Jam (0 Hari)	4,59 Jam (0,61 Hari)	4,59 Jam (0,61 Hari)
14.	Siti Rahmawati, S.E.	0 Jam (0 Hari)	4,01 Jam (0,53 Hari)	4,01 Jam (0,53 Hari)
15.	Rastri Paramita, S.E., M.M.	0 Jam (0 Hari)	3,90 Jam (0,52 Hari)	3,90 Jam (0,52 Hari)
16.	Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.	0 Jam (0 Hari)	1,24 Jam (0,17 Hari)	1,24 Jam (0,17 Hari)
17.	Marihot Nasution, S.E., M.Si.	0 Jam (0 Hari)	1,15 Jam (0,15 Hari)	1,15 Jam (0,15 Hari)
18.	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.	0 Jam (0 Hari)	0,23 Jam (0,03 Hari)	0,23 Jam (0,03 Hari)

Adapun penggunaan cuti dan izin sepanjang tahun 2016 dijelaskan dalam tabel 5.3. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa semua pegawai di lingkungan Pusat Kajian Anggaran telah menggunakan hak cuti dan izinnnya. Rata-rata cuti tahunan yang digunakan adalah 8,2 hari. Sementara untuk izin rata-rata setahun adalah 2 hari. Sementara untuk izin terlambat atau pulang cepat rata-rata 4 jam.

Tabel 5.3 Jumlah Cuti dan Izin Pegawai

No	Jenis Cuti dan Izin	Jumlah Pegawai	Rata-Rata Hari/Jam
1	Cuti Melahirkan	3	40
2	Cuti Tahunan	18	8,2
3	Izin Tidak Masuk	14	2
4	Izin terlambat/pulang cepat	11	4

B. Peningkatan Kompetensi

Berdasarkan tabel 5.4, dari pegawai sebanyak 18 orang dapat dirinci dari sisi akademis yaitu berijazah S-3 sebanyak 1 orang (5,56%), S-2 sebanyak 11 orang (61,11%), S-1 sebanyak 4 orang (22,22%), dan SMU sebanyak 2 orang (11,11%). Dari komposisi tingkat pendidikan tersebut setiap pegawai dituntut untuk meningkatkan potensinya masing-masing.

Tabel 5.4 Latar Belakang Pendidikan Pegawai

No	Jenis Jabatan	Pendidikan				Total
		S3	S2	S1	SMU	
1	Pejabat Tinggi Pratama	1	-	-	-	1
2	Pengawas	-	1	-	-	1
3	Pelaksana	-	-	2	2	4
4	Analisis APBN	-	11	2	-	13
	Total	1	12	4	2	19

Untuk meningkatkan kompetensi, selama tahun 2016 telah dilakukan beberapa pelatihan sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel 5.5. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pegawai di lingkungan Pusat Kajian Anggaran sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan juga oleh pihak luar yang bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI.

Tabel 5.5 Jenis Pendidikan dan Pelatihan

No	Jenis Cuti dan Izin	Jumlah Peserta	Jabatan Peserta
1	<i>Transformational Leadership</i>	1	Pejabat Tinggi
2	<i>Cost and Benefit Analysis</i>	18	Pejabat Tinggi, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Administrasi
3	LAKIP	1	Pejabat Administrasi
4	Teknik Presentasi	1	Pejabat Fungsional Tertentu
5	Diklat Bahasa Inggris	1	Pejabat Administrasi
6	Bimtek Keuangan	1	Pejabat Administrasi

Keterkaitan antara pendidikan dan pelatihan dengan pencapaian *output*, misalnya untuk memperkuat analisis APBN yang terkait dengan rekomendasi kebijakan yang terkait dengan penerimaan negara telah dilaksanakan pelatihan *Cost and Benefit Analysis* yang mengambil tema tentang *tax amnesty*. Begitu juga bagi efektivitas pencapaian pengelolaan organisasi bagi Pejabat Tinggi Pratama telah diberikan pendidikan *Transformational Leadership*.

BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PENDUKUNG

Untuk mendukung pencapaian target kinerja *output* dan kualitasnya selama tahun 2016 Pusat Kajian Anggaran juga didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

A. Pengelolaan ATK

Untuk mencapai *output* yang sudah ditetapkan, selama tahun 2016 Pusat Kajian Anggaran telah menggunakan berbagai Alat Tulis Kantor (ATK) sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel 6.1. Sebagai contoh, berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa selama tahun 2016 Pusat Kajian Anggaran telah menggunakan kertas A4 sebanyak 205 rim.

Tabel 6.1. Jumlah Penggunaan ATK

No	Jenis Barang	Jumlah Permintaan	Stock
		235	30
2	Kertas F4 (rim)	20	10
3	Amplop putih 95 mm x 152 mm (lembar)	200	-
4	Amplop putih 110 mm x 230 mm (lembar)	896	200
5	Map putih (lembar)	720	-
6	Map Biru (lembar)	720	50
7	Sampul piper warna kuning(lembar)	1260	500
8	Sampul piper warna merah muda (lembar)	1260	1000
9	Tinta Tonner cannon (buah)	36	2
10	Tinta Tonner HP laserjet 1022 (unit)	24	1
11	Aoutner (buah)	24	-
12	Batu Betere Besar (pcs)	120	3
13	Batu Batere Kecil 2A (pcs)	672	2
14	Stapler Besar (buah)	36	-
14	Stapler Kecil (buah)	36	7
15	Kaset DVD Kosong (buah)	240	-
16	Balpoint (buah)	300	5
17	Pensil 2B (buah)	180	12
18	Binder Clips NO.200 (buah)	600	96
19	Lakban Hitam (rol)	20	-
20	Lakban putih (rol)	20	-
21	Glue Stick (buah)	60	-
22	Spidol kecil (buah)	180	-
23	Spidol Besar (buah)	180	3
24	Plasdisk (buah)	60	1
25	Map putih berlogo/warna (buah)	180	-
26	Buku Besar (buah)	36	-
27	Buku Kecil (buah)	36	-
28	Thermal paper Roll (buah)	60	-
29	Penggaris (buah)	20	-

30	Staples No.10-1M (unit)	180	7
31	Sampul Besar (lembar)	300	-
32	Amplop coklat kecil berlogo (lembar)	1260	-
33	Amplop coklat besar berlogo (lembar)	300	50
34	Staples No.3-1M (kotak)	180	5
35	Gunting (buah)	20	2
37	Cater Besar / Kecil (buah)	10	1
38	Stabilo	240	5
39	Penghapus Balpoint (buah)	60	-
40	Penghapus Pensil (buah)	60	-
41	Mark N Notes (buah)	960	4
42	Blinder Clips (buah)	480	120
43	Pembolong Kertas Kecil (buah)	20	3
44	Pembolong Kertas Besar (buah)	20	4
45	Kalkulator (unit)	2	-

B. Pengelolaan Inventaris Kantor

Dalam menjalankan tupoksi dan pencapaian kinerja *output*, Pusat Kajian Anggaran juga didukung dengan barang inventaris kantor. Sampai dengan akhir 2016 inventaris kantor yang dikelola oleh Pusat Kajian Anggaran dijelaskan dalam tabel 6.2. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa Pusat Kajian Anggaran didukung dengan perangkat kerja komputer desktop sebanyak 21 buah, dimana jumlah ini sebanding dengan jumlah pegawai yang ada. Namun demikian perangkat kerja utama yang dirasakan kurang dan butuh modernisasi adalah *laptop*. Keberadaan *laptop* ini diperlukan untuk persentasi pada saat diskusi dalam rangka menghasilkan produk analisis APBN.

Tabel 6.2. Jumlah Inventaris Kantor

No	Nama Barang	Merek	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	Mesin Photo Copy	Sharp	2010	2 Unit	Baik
2	Laptop			2 Unit	Baik
3	Inpfokus			1 Unit	Baik
4	Komputer	Dell	2007	1 Unit	Baik
5	Komputer	Dell	2008	1 Unit	Baik
6	Komputer	Dell	2010	1 Unit	Baik
7	Komputer	Dell	2014	10 Unit	Baik
8	Komputer	Dell	2015	8 Unit	Baik
9	Printer	Cannon	2014	12 Unit	Baik
10	Printer	Duco Print C1110		1 Unit	Rusak
11	Printer	Cannon	2015	6 Unit	Baik
12	Printer	Hp Laser Jet 1022	2006	4 Unit	Baik
13	Printer	Hp Laser Jet 1022	2007	1 Unit	Baik
14	Coffee maker			2 Unit	Baik
15	Televisi Led 32 inch	Sharp		1 Unit	Baik
16	Televisi Led 42 Inch	Sharp		1 Unit	Baik
17	TV 32 Inch	Samsung		1 Unit	Baik
18	Jam Dinding	Seiko		3 Unit	Baik
19	Burung Garuda			1 Buah	Baik
20	Lemari Es	Sharp		1 Unit	Baik
21	Lemari Es	Glacio		1 Unit	Baik
22	Meja Kerja Kayu			26 Unit	Baik
23	Kursi Kerja			38 Buah	Baik

24	Kursi Tamu			2 Buah	Baik
25					
26	Filing Kabinet Besi			4 Unit	Baik
27	Kalkulator	Citizen	2014	1 Unit	Baik
28	Facsimile	Panasonic	2014	2 Unit	Baik
29	Dispenser	Modena	2012	2 Unit	Baik
30	Penghancur Kertas	Shard Master		1 Unit	Baik
31	AC Split			4 Unit	Baik
32	Mesin Tik Elektrik			2 Unit	Baik
33	Fakta Integritas			1 Buah	Baik
34	Kamera	Sony Ds 9-H 20	2013	1 Unit	Baik
35	Alat Perekam	Sony		2 Unit	Baik
36	Scanner			1 Unit	Baik
37	Meja Rapat		2016	1 Buah	Baik

C. Pengelolaan Ruang Kerja

Memasuki tahun pertama Pusat Kajian Anggaran menempati dua ruang yang dulu digunakan oleh Bagian Analisa APBN pada Biro Analisa APBN di lantai 5 Gedung Setjen DPR RI, yaitu ruang Bagian Analisa APBN dan ruangan yang diperuntukan untuk pengelolaan UP2DP.

Kemudian pada pertengahan Bulan September 2016 Pusat Kajian Anggaran menempati dua ruangan di lantai 5 dan 6 Gedung Setjen DPR RI. Lantai 5 merupakan ruang Analis APBN yang sama seperti sebelumnya dan Lantai 6 ruang kepala Pusat Kajian Anggaran dan Staf Administrasi.

Terakhir pada 6 Januari 2017, Pusat Kajian Anggaran menyatukan ruang kepala Pusat Kajian Anggaran dan Staf Administrasi serta ruang Analis APBN di lantai 6.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka peyelenggaraan tugas dan fungsi Pusat Kajian Anggaran selama tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian target kinerja *output* organisasi Pusat Kajian Anggaran mencapai **101,87 persen** untuk kinerja *cascading* dan **108,25 persen** untuk *noncascading*. Rata-rata kinerja *output* pegawai yang dinyatakan sebagai SKP dalam perjanjian kinerja setiap pegawai (PPKP) di Pusat Kajian Anggaran adalah **91,28 persen**;
2. Pencapaian target di atas dapat terealisasi karena didukung dengan berbagai kegiatan. Rata-rata pencapaian kegiatan adalah **88,67 persen**. Meskipun pencapaian kegiatan tidak mencapai seratus persen tetapi tidak dibarengi dengan pengurangan *output*. Hal ini dikarenakan untuk realisasi anggaran dilakukan efisiensi sehingga terdapat beberapa kegiatan dan volumenya yang dikurangi.
3. Untuk mencapai target kinerja *output* didukung dengan alokasi anggaran dalam DIPA Pusat Kajian Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp3.980.111.000. Adapun realisasinya adalah sebesar Rp.3.625.916.900 atau mencapai **91,10 persen** dari alokasi anggaran yang ada dalam DIPA Pusat Kajian Anggaran Tahun Anggaran 2016. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.625.916.900 tetapi dibarengi dengan pencapaian target kinerja 100 persen lebih maka terdapat efisiensi anggaran sebesar **8,90 persen**.
4. Pencapaian target kinerja tidak cukup didukung dengan anggaran tetapi juga dengan keberadaan SDM. Peran SDM ini terlihat dari:
 - 1) Tingkat kedisiplinan yang tinggi yaitu rata-rata pelanggaran jam kerja adalah **5,49 hari atau 1,6 hari** (tanpa memasukkan Handriyanto Setiadi, S.E., M.E) dan hanya **5,5 persen** pegawai yang mendapatkan sanksi; dan,
 - 2) Untuk mendukung pencapaian *output* dan kualitasnya selama tahun 2016 juga telah dilakukan beberapa kegiatan pengembangan SDM baik yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan juga oleh pihak luar yang bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI. Rata-rata pengembangan kompetensi pegawai adalah **100 persen**.
5. Pencapaian target kinerja juga didukung dengan kecukupan sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan ATK dan Barang Inventaris Kantor.
6. Terakhir pencapaian target kinerja juga didukung dengan keberadaan tatalaksana seperti berbagai pedoman yang terkait dengan produk analisis dan SOP yang mengatur kegiatan di lingkungan Pusat Kajian Anggaran.
7. Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tatakelola Pusat Kajian Anggaran, maka Kepala Pusat Kajian Anggaran telah melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

- 1) Rapat koordinasi yang membicarakan pencapaian *output* dan kegiatan sesuai dengan *output planning* dan *cash planning*;
- 2) Sebagai bagian dari proses penghindaran atas kesalahan administrasi yang dapat berdampak kepada keuangan, maka telah dilakukan penerapan kartu kendali; dan,
- 3) Pembinaan sisi kepegawaian secara terus menerus.

B. Permasalahan

1. Pada aspek sumber daya manusia permasalahan mendasar adalah kurangnya jumlah Analis APBN. Dengan keterbatasan jumlah Analis APBN tersebut maka pemberian dukungan kepada DPR terutama untuk layanan pendampingan di Komisi-Komisi sulit untuk dilakukan. Pada tahun 2016 sudah direncanakan untuk melakukan rekrutmen PTT tetapi rencana ini tidak dapat dilaksanakan karena kebijakan penundaan. Untuk itu diharapkan di tahun 2017 rekrutmen PTT sebanyak 10 orang dapat direalisasikan.
2. Pada aspek sarana dan prasarana kerja, permasalahan mendasar adalah ruang kerja bersama antara dua unit Eselon II dari Eselon I yang berbeda yaitu ruang kerja Analis APBN (Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI) dengan Auditor (Inspektorat Utama). Hal ini tentu menimbulkan dampak psikologis bagi Analis APBN seolah kerja/keberadaan Analis APBN berada dalam pengawasan Auditor dikarenakan Auditor yang merupakan perangkat Inspektorat Utama sebagai pengawas internal. Karena itu mengawali tahun 2017 agar tercipta iklim bekerja yang kondusif maka ruang Analis APBN dipindahkan ke lantai 6.

C. Rekomendasi

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka disampaikan beberapa rekomendasi berikut:

1. Di bidang sumber daya manusia harus segera dilakukan penambahan. Adapun mekanisme yang bisa dilakukan adalah dengan cara melakukan rekrutmen pegawai tidak tetap. Disamping itu juga perlu adanya penyegaran tentang tatakelola anggaran untuk para pejabat administrator.
2. Mempercepat renovasi ruang kerja Analis APBN agar memenuhi standar ruang yang representatif dan penambahan ruang rapat untuk Analis APBN.